

LAPORAN KINERJA
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN
KEBIJAKAN PERTANIAN
2019



PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2020

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2019 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan kinerja PSEKP dalam menghasilkan dan kinerja pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, kualitas layanan publik PSEKP, serta pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP di lingkungan PSEKP pada TA. 2019. Secara rinci laporan ini mencakup aspek pengelolaan anggaran, permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah inisiatif untuk mengatasinya dan pencapaian kinerja PSEKP TA. 2019 diukur dari indikator masukan dan keluaran (*output*).

Diharapkan LAKIN PSEKP TA. 2019 dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap kegiatan dan capaian PSEKP selama tahun 2019, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kami terbuka dan sangat menghargai terhadap saran dan masukan untuk perbaikan laporan ini. Kepada tim yang telah menyiapkan dan menyusun laporan ini diucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Januari 2020

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | viii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 8 |
| A. Perencanaan | 8 |
| 1. Visi dan Misi | 8 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 9 |
| 3. Arah Kebijakan | 10 |
| 4. Strategi | 14 |
| B. Perjanjian Kinerja | 15 |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. Kriteria Ukuran Keberhasilan | 17 |
| B. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 | 18 |
| C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 20 |
| D. Akuntabilitas Keuangan | 46 |
| E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya | 53 |
| F. Capaian Kinerja Lainnya | 54 |
| G. Rencana Aksi | 55 |
| IV. PENUTUP | 57 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | U r a i a n | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir per bulan Desember 2019 | 4 |
| 2. | Keragaan SDM PSEKP berdasarkan kualifikasi pendidikan dan usia pegawai, tahun 2018-2019..... | 5 |
| 3. | Keragaan SDM PSEKP berdasarkan tugas jabatan (tahun 2018-2019) | 7 |
| 4. | Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan PSEKP | 10 |
| 5. | Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Target PSEKP | 16 |
| 6. | Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019 | 19 |
| 7. | Target dan Realisasi Output Kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, Tahun 2019 | 21 |
| 8. | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019 | 36 |
| 9. | Interval Hasil Penilaian IKM | 37 |
| 10. | Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019 | 40 |
| 11. | Perbandingan Keluaran/ <i>Output</i> Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2017-2019 | 45 |
| 12. | Perkembangan Pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2019 | 48 |
| 13. | Realisasi Anggaran Per Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2019 | 49 |
| 14. | Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penelitian Menurut Sasaran Kegiatan Pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2019 | 50 |
| 15. | Target dan Realisasi Anggaran Program Utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019 | 51 |

| Tabel | U r a i a n | Halaman |
|--------------|--|----------------|
| 16. | Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2019..... | 52 |
| 17. | Rencana Aksi Perbaikan Kinerja PSEKP tahun 2019 | 55 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | U r a i a n | Halaman |
|---------------|---|----------------|
| 1. | Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2019 | 3 |
| 2. | Rekap pegawai PSEKP menurut usia pada tahun 2018 sampai 2019..... | 5 |
| 3. | Rekapitulasi pegawai PSEKP menurut pendidikan terakhir tahun 2018 dan 2019..... | 6 |
| 4. | Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2019..... | 39 |
| 5. | Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2019 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011 | 53 |
| 6. | Penghargaan yang diterima PSEKP dari Perpustakaan Nasional, 2019..... | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | U r a i a n | Halaman |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Perjanjian Kinerja PSEKP, Tahun 2019..... | 58 |
| 2. | Rekomendasi Kebijakan PSEKP, Tahun 2015-2019..... | 65 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan hasil kerja PSEKP yang dilakukan selama TA. 2019 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit Kementerian Pertanian yaitu menghasilkan dan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian. Indikator Kinerja PSEKP meliputi dimanfaatkannya rekomendasi yang dihasilkan, kualitas layanan publik yang dilakukan oleh PSEKP, dan pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP. Untuk mencapai kinerja tersebut, input atau masukan yang digunakan adalah anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM).

Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2019 ditetapkan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP, dengan kriteria penilaian terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu: Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%, Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2019, dari 5 indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2019 terdapat 3 (tiga) indikator yang termasuk dalam kategori sangat berhasil mencapai target, sedangkan 2 indikator tergolong kategori berhasil atau sesuai target. Dua indikator yang sangat berhasil melampaui target yaitu Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang dan Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang. Sedangkan tiga indikator yang berhasil dicapai sesuai target yaitu Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dan Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran.

Pada Tahun 2019, anggaran PSEKP yang dikelola adalah anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2019 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang; dan (c) Belanja modal. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2019 adalah Rp35.311.327.000,00 terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp33.535.311.000,00 dan anggaran bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp1.776.016.000,00, dengan realisasi sebesar Rp34.258.432.788,00 atau 97,02 persen.

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Kedepan tuntutan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada penelitian semakin besar seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang makin dinamis dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin berat. Penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan yang dilakukan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian turut berkontribusi terwujudnya *research based policy* dalam pembangunan pertanian. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pembangunan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (*policy research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis, karena: (1) dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usahatani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

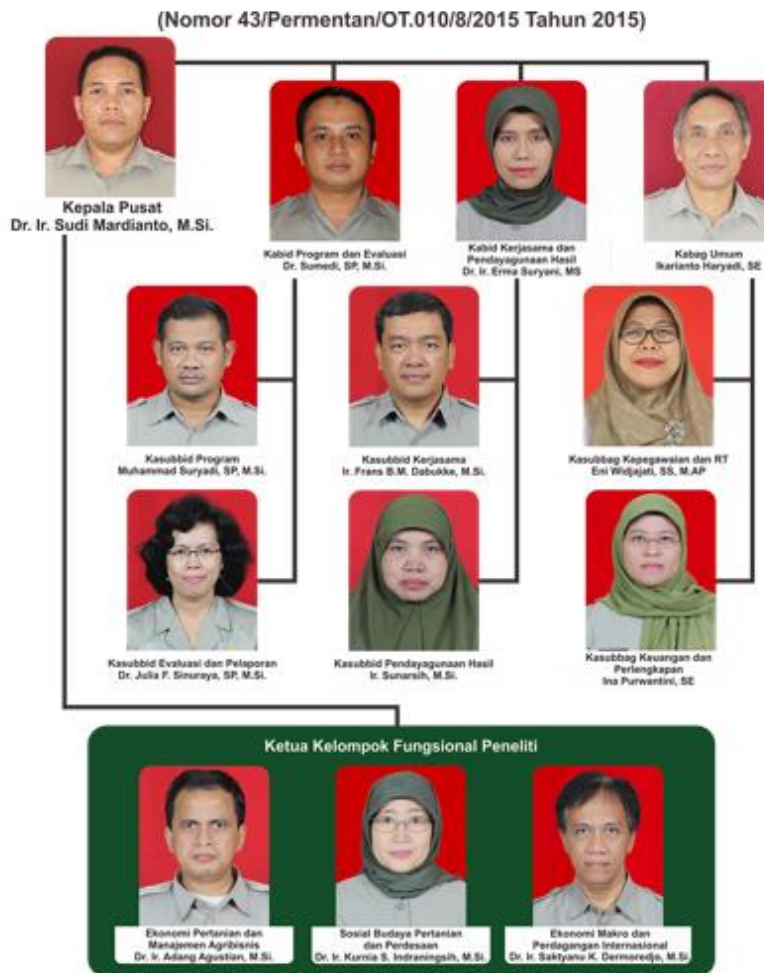
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan lembaga eselon IIa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Sejarah lembaga ini berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada Tahun 1974, yang kemudian seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali mengalami perubahan kedudukan nama. Pada Tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).

Dasar hukum terakhir terkait tugas, fungsi, dan struktur organisasi PSEKP adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/ OT/010/8/

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Permentan tersebut, PSEKP adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Permentan tersebut dilengkapi dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 232/Kpts/OT.010/4/2016 tentang Pembinaan teknis penelitian, pembinaan teknis pejabat fungsional peneliti PSEKP masih tetap berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian meliputi: penilaian angka kredit, pendidikan, pelatihan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi. Sebagai institusi lingkup Kementerian Pertanian yang diberi mandat melaksanakan penelitian sosial ekonomi secara nasional, PSEKP diharapkan menjadi lembaga yang mampu mengintegrasikan berbagai kegiatan, yaitu penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian (sebagai lembaga ilmiah), analisis kebijakan pembangunan pertanian (sebagai lembaga pemerintahan), penyuluhan (sebagai elemen penunjang sistem agribisnis), dan advokasi pembangunan pertanian (sebagai lembaga kemasyarakatan) guna mewujudkan tujuan pembangunan dengan pelayanan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 1225 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2015 tersebut, PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Sementara Pasal 1226 mengatur fungsi PSEKP dalam hal: (1) Perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (2) Pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (3) Pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian, (4) Pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (5) Pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, (6) Evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi serta kebijakan pertanian, dan (7) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2019), PSEKP telah dipimpin oleh sepuluh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof. Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002 dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Dr. Handewi Purwati Saliem (2010-2016), Dr. Abdul Basit (2016-2019), dan Dr. Sudi Mardianto (2019-sekarang). Struktur organisasi PSEKP Tahun 2019 (Gambar 1). Berdasarkan SK Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nomor: 368/Kp.330/A.9/03/2009, Kelompok Peneliti (Kelti) yang ada di PSEKP terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yakni: (1) Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional (EMPI), (2) Ekonomi Pertanian dan Manajemen Agribisnis (EPMA), dan (3) Sosial Budaya Pertanian dan Perdesaan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2019

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSEKP dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya selama TA. 2019. Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP, yaitu kegiatan penelitian, baik kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerja sama penelitian dengan institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan publikasi ilmiah melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga memuat kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2019 sebanyak 114 orang yang terdiri dari 109 Pegawai Negeri Sipil. Dari jumlah tersebut, tiga orang ditugaskan sementara di luar PSEKP dan tiga orang masih berstatus CPNS. Jumlah SDM pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2018 SDM PSEKP sebanyak 129 orang yang terdiri dari 125 orang Pegawai Negeri Sipil, 3 orang dipekerjakan di luar PSEKP dan 1 orang CPNS. Berkurangnya SDM terutama karena memasuki purna tugas. Jumlah pegawai yang memasuki purna tugas pada tahun 2019 sebanyak 18 orang terdiri dari 4 orang pejabat fungsional Peneliti Utama; 5 orang pejabat fungsional Peneliti Madya; 8 orang Pelaksana dan 1 orang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP). Sedangkan 1 orang pegawai mutasi alih tugas karena promosi sebagai pejabat administrator di Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Tahun 2019 terdapat alokasi formasi CPNS sebanyak 3 orang (2 orang calon Peneliti Ahli Pertama dan 1 orang calon Analis Kebijakan Ahli Pertama)

Tabel 1. Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan akhir per bulan Desember 2019

| No | Usia(Thn) | S3 | S2 | S1 | D4 | SM | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|
| 1 | 26-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 31-35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 36-40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 41-45 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | 46-50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 51-55 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 26 |
| 7 | 56-60 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 34 |
| 8 | 60-65 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Jumlah | | 31 | 21 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 114 |

Sumber: SIM ASN Kementan, 2019

Tabel 1 menunjukkan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan usia dan pendidikan akhir. Pegawai dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 31 orang (27,19 %); pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 21 orang (18,42%). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK) bahwa untuk peneliti dan litkayasa telah ditetapkan bahwa batas usia pensiun (BUP) 65 tahun untuk Peneliti Ahli Madya dan batas usia pensiun pejabat Peneliti Ahli Utama hingga 70 tahun.

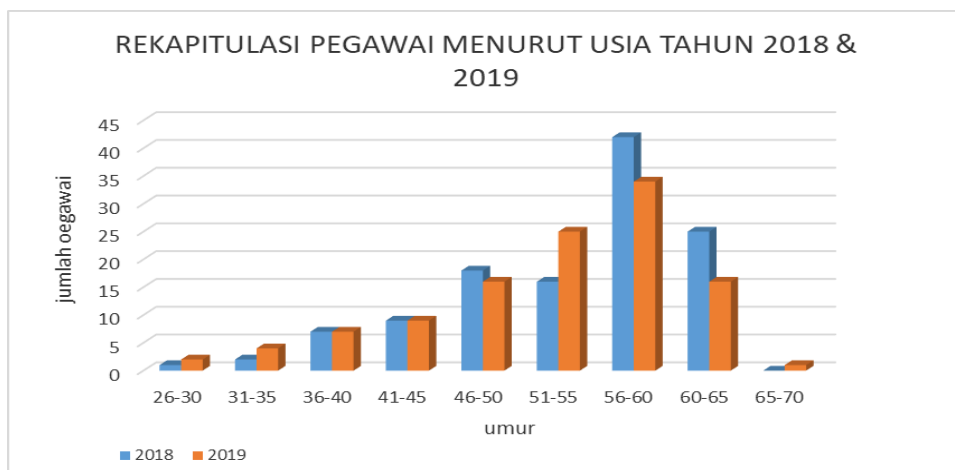
Tabel 2 berikut merupakan keragaan SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan dan usia pegawai pada tahun 2018 -2019. Tingkat pendidikan SDM PSEKP mulai dari SD hingga S3.

Tabel 2. Keragaan SDM PSEKP berdasarkan kualifikasi pendidikan dan usia pegawai, tahun 2018-2019

| No | Usia(Thn) | S3 | | S2 | | S1 | | SM | | D3 | | D2 | | D1 | | SLTA | | SLTP | | SD | |
|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 1 | 26-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31-35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 36-40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 41-45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 46-50 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 51-55 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 56-60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 60-65 | 18 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 65-70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 33 | 32 | 26 | 21 | 23 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 |

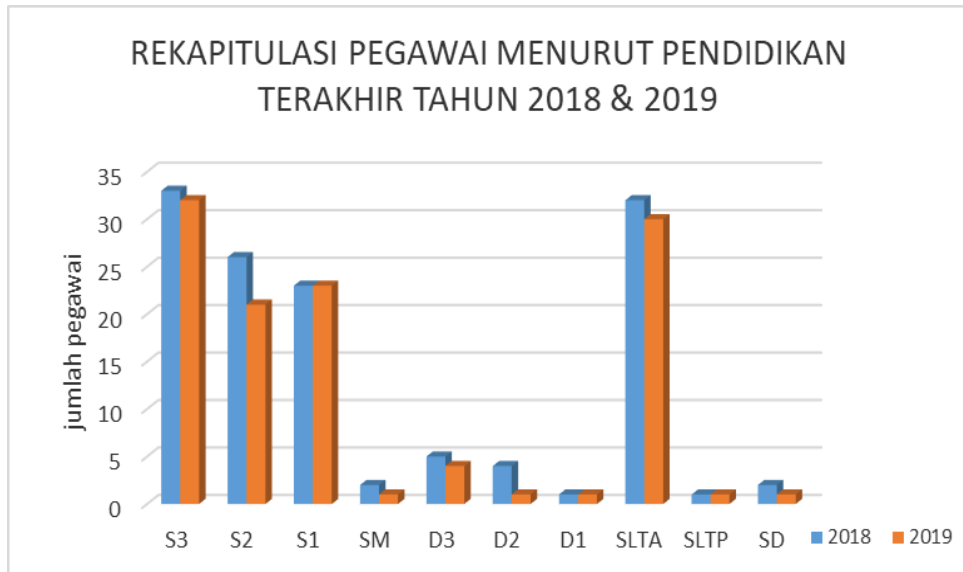
Sumber: SIM ASN Kementan, 2019

Komposisi pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 jumlahnya menurun dari tahun 2018 ke 2019 karena 2 orang Peneliti Ahli Utama dan Ahli Madya yang memasuki masa purna tugas, namun ada satu orang petugas belajar yang telah selesai tugas belajar S3 dan saat ini dalam proses kembali menjadi Peneliti Ahli Pertama. Perlu dicermati bahwa 2 tahun yang akan datang pegawai yang akan memasuki masa purna tugas sebanyak 13 orang non peneliti (pejabat pengawas dan pelaksana).



Gambar 2. Rekap pegawai PSEKP menurut usia pada tahun 2018 sampai 2019

Gambar 2 menunjukkan bahwa SDM terbanyak pada usia 55-60 tahun sehingga sangat diperlukan formasi yang cukup untuk memenuhi beban kerja organisasi dan kebutuhan SDM dan kualifikasi pendidikan yang sesuai.



Gambar 3. Rekapitulasi pegawai PSEKP menurut pendidikan terakhir tahun 2018 dan 2019

Gambar 3 menunjukkan bahwa pegawai dengan kualifikasi pendidikan S3 dan pendidikan S2 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah SDM peneliti ahli madya (S2) karena purna tugas. SDM dengan jenjang pendidikan S1 tidak mengalami perubahan sejak tahun 2019 hingga 2019. Peningkatan kapasitas SDM PSEKP masih dapat dilakukan melalui tugas belajar atau izin belajar bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi.

Keragaan SDM PSEKP berdasarkan tugas jabatan pada tahun 2018 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 3. Menurunnya jumlah SDM tahun 2018 sebanyak 129 orang menjadi 114 orang pada tahun 2019 disebabkan masa purna tugas, masa persiapan purna tugas, pensiun atas permintaan sendiri, promosi jabatan struktural dan selesai tugas/ijin belajar. Jumlah pejabat struktural tidak mengalami perubahan sesuai dengan struktur organisasi tahun 2019 yaitu 10 orang. Pejabat fungsional peneliti mengalami penurunan mengalami penurunan dari 38,76% menjadi 38.60% yang disebabkan oleh purna tugas. Penurunan fungsional peneliti untuk jenjang Peneliti Ahli Utama, Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Muda. Sementara Peneliti Ahli Pertama mengalami peningkatan karena ada pengangkatan CPNS tahun 2019. Selain fungsional peneliti, PSEKP juga diperkuat dengan adanya fungsional lainnya yaitu fungsional

Analisis Kebijakan, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Humas, Analisis Kepegawaian, Calon Perencana, dan fungsional umum.

Tabel 3. Keragaan SDM PSEKP berdasarkan tugas jabatan (tahun 2018-2019)

| NO | JABATAN | JUMLAH | | | |
|----|---|--------|--------|------|--------|
| | | 2018 | % | 2019 | % |
| 1 | Pejabat Struktural | 10 | 7,75 | 10 | 8,77 |
| 2 | Pejabat Fungsional Peneliti | 50 | 38,76 | 44 | 38,60 |
| | Peneliti Ahli Utama | 20 | | 16 | |
| | Peneliti Ahli Madya | 16 | | 13 | |
| | Peneliti Ahli Muda | 6 | | 5 | |
| | Peneliti Ahli Pertama | 6 | | 7 | |
| | Calon Peneliti | 2 | | 3 | |
| 3 | Peneliti yang diberhentikan karena penugasan sebagai pejabat struktural | 7 | 5,43 | 6 | 5,26 |
| 4 | Pejabat Fungsional Tertentu lainnya | 10 | 7,75 | 10 | 8,77 |
| | Analisis Kebijakan Ahli Madya | 1 | | 1 | |
| | Pustakawan Pertama | 2 | | 1 | |
| | Arsiparis Ahli Muda | 1 | | 1 | |
| | Arsiparis Ahli Pertama | 1 | | 1 | |
| | Pranata Humas Ahli Pertama | 1 | | 1 | |
| | Pranata Humas Pelaksana | 1 | | 1 | |
| | Analisis Kepegawaian Mahir | 1 | | 1 | |
| | Analisis Kepegawaian Terampil | 1 | | 1 | |
| | Calon Perencana Ahli Pertama | 1 | | 1 | |
| | Calon Analisis Kebijakan Ahli Pertama | 0 | | 1 | |
| 5 | Pelaksana (Fungsional Umum) | 52 | 40,31 | 44 | 38,60 |
| | Jumlah | 129 | 100,00 | 114 | 100,00 |

Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal PSEKP pada Tahun Anggaran 2019 senilai Rp34.674.407.000,00. Pada perkembangannya pagu anggaran mengalami revisi karena refokusing program Kementerian Pertanian, yaitu berkurang sebesar Rp1.139.096.000,00 menjadi Rp33.535.311.000,00. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pagu karena ada tambahan anggaran hibah kerjasama penelitian dari ACIAR dan IFPRI, sehingga meningkat menjadi senilai Rp35.311.327.000,00 atau bertambah sebesar Rp1.776.016.000,00.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

1. Visi dan Misi

Berdasarkan visi Kabinet Kerja yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka **Visi Kementerian Pertanian** adalah:

“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”

Dengan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2020, maka **Visi Sekretariat Jenderal**-Kementerian Pertanian adalah:

“Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administrasi Kementerian”

Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional, dan dengan berpedoman pada Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka **Visi PSEKP 2015 – 2019** dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pusat pengkajian yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk kesejahteraan petani dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih”

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi secara aktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka **Misi PSEKP** yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan penelitian dan pengkajian guna menghasilkan informasi, inovasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian.
2. Melakukan analisis kebijakan, pengkajian untuk mengolah informasi dan ilmu pengetahuan hasil analisis, serta mengembangkan hasil inovasi menjadi rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan advokasi pembangunan pertanian, berupa kampanye publik untuk memobilisir partisipasi lembaga terkait dan masyarakat luas dalam mendukung pembangunan pertanian yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan.
4. Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan visi dan misinya secara berkelanjutan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PSEKP selama tahun 2015-2019 adalah:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Pengelolaan sumberdaya pertanian, penguatan usaha pertanian, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan, (b) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral, dan (c) Sosial budaya, serta penguatan kelembagaan dan SDM pertanian yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani dan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Mengkaji model kelembagaan penerapan teknologi, sistem inovasi dan sistem usaha pertanian;
3. Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama, pengukuran indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, serta analisis dampak kebijakan pertanian;
4. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
5. Mengembangkan jaringan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri) dan *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian, serta efektivitas dan percepatan diseminasi hasil penelitian;

6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Menyebarluaskan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi dan analisis kebijakan pertanian kepada pengguna.

Indikator kinerja utama (IKU) PSEKP ditetapkan berdasarkan **Sasaran Kegiatan (SK)** sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. SK PSEKP yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) adalah seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan PSEKP

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) |
|-----|--|--|
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang |
| | | Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang |
| | | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Prmenpan RB 12 tahun 2015) |

3. Arah Kebijakan

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian dan Sekretariat Jenderal serta visi, misi, dan tugas dan fungsi PSEKP, maka **kebijakan dasar** PSEKP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani; dan

4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan *good governance*.

Program dan Kegiatan Penelitian

Berkaitan dengan sinkronisasi program/kegiatan penelitian dengan program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, PSEKP melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti LIPI atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih menekankan pada *problem solving research* untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait sebagai *stakeholders* dengan rencana penelitian/pengkajian PSEKP.

Dalam upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSEKP membentuk Tim Teknis Perencanaan dan Program Penelitian PSEKP melalui Surat Penugasan Kepala Pusat Nomor 61/HK.160/A.11/01/2019 tanggal 10 Januari 2019. Tim Teknis tersebut terdiri dari Profesor Riset dan beberapa peneliti senior PSEKP yang dipandang mempunyai kapabilitas sebagai Tim Teknis Penelitian. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana penelitian/pengkajian yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal Operasional Penelitian. Dalam perencanaan program penelitian, Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1) Melakukan penjangkaran isu-isu utama pembangunan pertanian dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan penelitian PSEKP, (2) Melakukan penajaman arah dan program kegiatan penelitian PSEKP, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai penyusunan proposal penelitian, serta melakukan penelaahan dan penajaman rekomendasi kebijakan pertanian PSEKP.

Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan penelitian, dibentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2019, melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor 63/HK.160/A.11/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tugas Tim Pelaksana Monev adalah: (1) Melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2)

Memberikan penilaian terhadap hasil penelitian menurut tahapan penelitian sekaligus memberikan saran perbaikan dengan fokus pada upaya meningkatkan kualitas hasil penelitian dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab dan wajib mengindahkan serta mentaati semua ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelompokan kegiatan penelitian dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumber daya manusia. Kegiatan utama penelitian PSEKP pada tahun 2019 sumber dananya berasal dari APBN (DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas 12 (dua belas) judul penelitian dan analisis kebijakan pembanunan pertanian bersifat responsive dan antisipatif. Pada tahun 2019 kegiatan analisis kebijakan menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan. Sementara itu, judul kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani
2. Strategi Pengembangan Ekspor dalam Mendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani
3. Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi
4. Strategi Keberlanjutan Pengembangan (Kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri
5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan
6. Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional
7. Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usahatani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI
9. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan
10. Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024
11. Evaluasi Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao
12. Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan

Pada tahun 2019 PSEKP melakukan kegiatan kerja sama penelitian dengan dua lembaga penelitian internasional yang bersifat *multiyears*, yaitu the Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR) dan *the International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dengan lima kegiatan. Adapun judul kegiatan dimaksud, yakni;

1. "Improving Milk Supply Competitiveness a Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia (IndoDairy)", adalah kegiatan penelitian kerja sama dengan ACIAR
2. "Agricultural policy research to support natural resource management in Indonesia's upland landscapes (IndoGreen)", kegiatan penelitian kerja sama dengan ACIAR
3. "Development of area-wide management approaches for fruit flies in mango for Indonesia, Philippines, Australia and the Asia-Pacific region (IndoAWM)", kegiatan kerja sama penelitian dengan ACIAR
4. "Inclusive Agricultural Value Chain Financing (IndoFINANCE)", kegiatan kerja sama penelitian dengan IFPRI

Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. **Masukan (Input)** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Masukan yang digunakan dalam kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian. **Keluaran (Output)** merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan penelitian. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. **Hasil (Outcome)** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan pertanian. **Manfaat (benefit)** merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan **dampak (impact)** merupakan ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan, rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat *intangible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian PSEKP baru terlihat

setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat.

Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak analisis dan pengkajian secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut dapat diukur atas dasar *ex ante* analisis atau secara potensial. Secara umum, indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam periode 2015-2019 adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dari kegiatan analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil penelitian PSEKP adalah: (1) Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara lainnya, (2) Praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis, dan (3) Masyarakat umum. Disamping untuk *stakeholder* utama, hasil-hasil penelitian tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSEKP sendiri.

4. Strategi

Lima strategi prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran bagi pengembangan PSEKP lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan program kerja sama penelitian, pelatihan dan pendidikan DN dan LN.
2. Pengembangan model pengambilan keputusan berdasarkan analisis sosek pertanian (DSM).
3. Pemantapan proporsionalitas kepakaran bidang sosek bagi peneliti pemula (pendidikan S2 dan S3).
4. Penguatan metodologi penelitian dan pengembangan model analisis dalam rangka peningkatan kinerja hasil penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Melakukan peningkatan rekrutmen tenaga dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka.

Dari lima strategi prioritas tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dan kebijakan pengembangan kelembagaan PSEKP untuk periode 2015 – 2019 ke depan, yaitu: (1) Pengembangan SDM peneliti dan non-peneliti, (2) Peningkatan kualitas metodologi

penelitian dan pemutakhiran model analisis, (3) Peningkatan kualitas dan penyebaran publikasi hasil penelitian, dan (4) Pengembangan *networking* dengan lembaga terkait, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja sudah disepakati antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2019 berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam Renstra PSEKP 2015-2019. Dalam Renstra tersebut, Perjanjian Kinerja PSEKP mengalami perubahan mulai tahun 2018.

Pada Tahun 2019, PSEKP telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani bulan Januari 2019 dan direvisi sebanyak empat kali yaitu pada bulan Februari 2019 karena pergantian pejabat Kepala Pusat kepada Plt Kepala Pusat, bulan Juli 2019 yang diakibatkan adanya pergantian pejabat Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat PSEKP, dan bulan Desember 2019 dua kali revisi yang diakibatkan karena adanya perubahan anggaran dan penambahan anggaran dari hibah luar negeri. Adapun Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2019 meliputi:

1. Sasaran Kegiatan :

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis terdiri dari tiga sasaran kegiatan sebagai berikut:

- Sasaran kegiatan 1: Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian
- Sasaran kegiatan 2: Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Sasaran kegiatan 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

2. Indikator Kinerja :

Dari tiga sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan Target PSEKP yang ingin dicapai sebagai berikut (Tabel 5). Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian selain diperoleh dari hasil kegiatan rutin penelitian juga diperoleh dari kegiatan penelitian analisis kebijakan yaitu menanggapi isu-isu strategis maupun mengantisipasi isu aktual yang berkembang pada tahun

berjalan. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian selain diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian maka tahun 2019 ini PSEKP juga menyebarkan kuesioner layanan untuk eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 5. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Target PSEKP

| No. | Sasaran Kegiatan (SK) | Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) | Target |
|-----|--|--|------------------------|
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan | 90,00% |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 3,50 skala linkert 1-4 |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 0,00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 1,00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) | 1,00 Temuan |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2015-2019, sasaran kegiatan PSEKP ada tiga. Sasaran kegiatan PSEKP yang berkaitan dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yakni "Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian". Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada Tahun 2019 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan penelitian dilakukan melalui rapat bulanan, monev awal, monev pelaksanaan dan monev laporan akhir. Sementara itu realisasi keuangan dipantau menggunakan program berbasis web melalui penerapan Permenkeu No. 249 tahun 2011 setiap bulan yang diperbarui melalui Permenkeu No. 214 tahun 2017.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi, yakni keluaran (*output*) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2019 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus:

Capaian sasaran = $\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \times 100\%$

Kriteria penilaian terbagi terbagi 4 (empat) kategori kinerja berdasarkan skoring, yaitu:

1. Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%
2. Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
4. Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK). Hasil pengukuran kinerja yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi proposal awal penelitian sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai. Evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Profesor Riset dan Peneliti Senior. Ketua Kelti tidak menjadi anggota Tim Teknis, tetapi ikut serta dalam melakukan evaluasi proposal awal penelitian.
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan tengah tahun dan laporan akhir kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan. Jika ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dapat langsung dicari upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan tidak terganggu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Melakukan seminar proposal operasional dan seminar hasil penelitian sehingga terjadi proses cek dan recek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara bulanan melalui PMK 249/2011 diperbarui dengan PMK 214/2017 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 Tahun 2009).
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem untuk menjamin keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan kinerja sasaran kegiatan yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP Tahun 2019, capaian kinerja yang berkaitan dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, kualitas layanan publik terhadap layanan PSEKP, serta kinerja pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP PSEKP ditampilkan pada Tabel 6.

Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum menunjukkan hasil pencapaian sangat berhasil, beberapa capaian sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab C.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut, maka PSEKP merencanakan 3 (tiga) kegiatan beserta anggarannya yang dilakukan pada tahun 2019, yaitu:

1. Kegiatan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian, dengan pagu anggaran senilai Rp16.598.091.000,00
2. Kegiatan layanan internal yang terdiri dari kegiatan manajemen mendukung kegiatan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, kegiatan diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.391.485.000,00
3. Kegiatan layanan rutin pegawai dan operasional kantor, dengan pagu anggaran senilai Rp15.321.751.000,00

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | | | | Kategori |
|-----|--|---|-----------------------|------------------------|-------|-----------------|
| | | Uraian | Target | Capaian | % | |
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian | 1.1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan | 90,00 % | 90,00 % | 100 | Berhasil |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 3,5 skala linkert 1-4 | 3,23 skala linkert 1-4 | 92,28 | Berhasil |
| 3. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 3.1. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 0,00 Temuan | 0,00 Temuan | 100 | Berhasil |
| | | a. Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 1,00 Temuan | 0,00 Temuan | >100 | Sangat berhasil |
| | | b. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) | 1,00 Temuan | 0,00 Temuan | >100 | Sangat berhasil |

Secara umum, pencapaian kinerja PSEKP adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2019 tersebut senilai Rp35.311.327.000,-. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2019 senilai Rp34.258.432.788,- atau 97,02%. Dengan demikian, pencapaian kinerja output PSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 97,02% dari pagu. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), maka 2 (dua) dari 5 (lima) IKSK tercapai melebihi target atau "SANGAT BERHASIL", yaitu Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang dan Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang. Capaian kinerja 3 (tiga) IKSK masuk kategori "BERHASIL", yaitu Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan, Nilai Kualitas Pelayanan Publik PSEKP (IKM), dan Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 97,02% tersebut PSEKP telah mampu mencapai target kinerja untuk 5 (lima) IKSK, yaitu Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik PSEKP, Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang, Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang, dan Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang. Rincian pencapaian masing-masing IKSK serta serapan anggaran akan dibahas pada subbab berikutnya.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2019 dengan kinerja tahun 2018 serta beberapa tahun sebelumnya. Analisis dan evaluasi capaian kinerja PSEKP tahun 2019 menurut penetapan tiga sasaran sesuai dengan rencana strategis (Renstra 2015-2019). Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja PSEKP tahun 2019. Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian terdiri dari hasil penelitian rutin dan penelitian

analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dijabarkan pada uraian berikut ini.

1. Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian

Sasaran kinerja kegiatan PSEKP yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. *Output* kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Target dan Realisasi Output Kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, Tahun 2019

| No. | Kegiatan | Target | Realisasi (Output) |
|-----|--|----------------------------|--|
| 1. | Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan dinamika kesejahteraan rumah tangga petani |
| 2. | Strategi Pengembangan Ekspor dalam Mendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan strategi pengembangan ekspor dalam mendorong pertumbuhan subsektor hortikultura dan pendapatan petani |
| 3. | Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan analisis manajemen rantai pasok komoditas buah substitusi impor di kawasan sentra produksi |
| 4. | Strategi Keberlanjutan Pengembangan (Kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan strategi keberlanjutan pengembangan (kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri |
| 5. | Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di pertanian dan perdesaan |
| 6. | Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan kebijakan pengembangan perbenihan sayuran Nasional |
| 7. | Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usahatani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan rancang bangun dan implementasi konsolidasi usahatani beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura |
| 8. | Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan desain model pembiayaan pada kawasan pembangunan pertanian berbasis korporasi mendukung program SERASI |
| 9. | Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan peningkatan nilai tambah produk pertanian unggulan |
| 10. | Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024 | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan permasalahan, tantangan dan kebijakan pembangunan pertanian 2020-2024 |
| 11. | Evaluasi Program Asuransi Pertanian dan Rancangan | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan evaluasi program asuransi |

| No. | Kegiatan | Target | Realisasi (Output) |
|-----|--|-------------------------|--|
| | Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao | Kebijakan | pertanian dan rancangan implementasi asuransi usaha tani Tebu dan Kakao |
| 12. | Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan yang terkait transformasi pertanian dan perdesaan dan kesejahteraan petani serta perspektif ke depan |

Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, merepresentasikan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan hasil rekomendasi dari penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan ditandai dengan diserahkannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (*policy brief*) sosial ekonomi pembangunan pertanian.

Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut yang telah ditargetkan dalam tahun 2019 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang terealisasi 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan, yaitu: (1) Pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, yang dilaksanakan melalui 12 kegiatan, dan (2) Pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, yang dilaksanakan menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan.

Masukan (*input*) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan pengkajian tersebut adalah sumber daya manusia yakni peneliti dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Serapan dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian mencapai **94,68** persen dari target **Rp.4.917.059.000,-**. Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian diuraikan sebagai berikut:

a. Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

Tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia termasuk rumah tangga pertanian mengalami penurunan, yang ditunjukkan dengan peningkatan pangsa pengeluaran pangan selama kurun waktu 2014-2017. Tingkat kesejahteraan rumah tangga pertanian lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang bekerja di nonpertanian. Selain itu, perubahan yang terjadi pada kurun 2014-2017

adalah pangsa pengeluaran untuk karbohidrat menurun, sebaliknya pengeluaran makanan/minuman jadi mengalami peningkatan.

Peningkatan status ketahanan pangan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga akan meningkatkan kebahagiaan rumah tangga. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan yang dapat diartikan pula semakin rendah tingkat ketahanan pangan maka semakin rendah pula tingkat kebahagiaan rumah tangga di Indonesia. Prioritas program-program terkait peningkatan kebahagiaan dan atau kesejahteraan rumah tangga perlu diarahkan pada rumah tangga pertanian tanpa mengabaikan rumah tangga nonpertanian.

Bantuan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk dan alsintan sangat bermanfaat bagi petani. Namun demikian, bantuan tersebut tidak selalu menciptakan kebahagiaan/kesenangan bagi petani dikarenakan umumnya bantuan yang diterima kurang sesuai dengan kebutuhan petani dan kondisi wilayahnya. Oleh karena itu, jenis bantuan ke depan perlu memperhatikan kondisi wilayah secara cermat (spesifik wilayah). Kostratani yang dinisiasi Kementerian Pertanian dapat menjadi wahana untuk mengimplementasikan program bantuan sesuai ketepatan jenis, spesifikasi kebutuhan dan kondisi wilayah.

Bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani hendaknya tidak hanya bantuan yang berwujud fisik semata, namun juga kegiatan pendampingan pemberdayaan petaninya untuk menumbuhkan partisipasi petani secara aktif, menggiatkan gotong royong sebagai wujud kebersamaan, dan diharapkan pemanfaatan bantuan akan berkelanjutan. Pada akhirnya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah akan terkikis, sehingga petani menjadi berdaya/mandiri.

Peningkatan pangsa konsumsi protein hewani dan penurunan pangsa pengeluaran pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya diversifikasi konsumsi sekaligus merupakan instrument kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga petani. Untuk itu pemerintah diharapkan tetap harus terus menggalakkan program diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan sumber karbohidrat, namun juga diversifikasi pangan secara keseluruhan menuju pola konsumsi Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA).

b. Strategi Pengembangan Ekspor dalam Mendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani

Komoditas hortikultura memiliki potensi ekspor yang besar mengingat beberapa komoditas hortikultura memiliki permintaan yang cukup tinggi di manca negara. Permintaan ekspor hortikultura tercermin dalam komoditas segar dan olahan. Pemerintah telah bertekad memacu pertumbuhan ekonomi nasional

yang lebih tinggi, berkualitas dan berkesinambungan, melalui peningkatan investasi dan surplus neraca perdagangan. Untuk merumuskan strategi pengembangan ekspor subsektor hortikultura diperlukan pemahaman menyeluruh tentang kendala dan tantangan produksi, kendala dan persyaratan ekspor, serta negara pesaing dan tingkat persaingan di pasar regional dan global.

Dalam usaha pertanian, kepemilikan property, salah satunya lahan, merupakan faktor produksi penting. Oleh karena itu, peningkatan investasi pertanian akan tergantung pada ketersediaan lahan, kemudahan mengurus perizinan dan pengusahaannya sebagai faktor produksi. Kendala mengurus perizinan kepemilikan lahan di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama calon investor tidak/belum mengetahui prosedur pengurusan perizinan kepemilikan lahan. Kedua, di pulau Jawa, lahan untuk usaha pertanian sudah bernilai sangat tinggi, karena ketersediaan lahan tak sebanding dengan kebutuhan. Nilai lahan yang semakin tinggi telah memicu munculnya para spekulasi lahan.

Perlunya perubahan orientasi pada pasar, bila potensi pasar pada komoditas tertentu menjanjikan sebaiknya para pengambil kebijakan juga sudah memiliki perubahan kebijakan pada pola orientasi pasar sebagai dasar pengembangan pembangunan pertanian, khususnya hortikultura. Perlunya kerja sama antar lembaga terkait tersebut, sehingga terdapat hubungan aliansi antara yang kuat dan lemah bisa direalisasikan melalui program intensif. Hal ini memperlihatkan dinamika kebijakan antar lembaga terkait untuk melakukan strategi pengembangan ekspor. Bila strategi itu dilakukan akan memperkuat hubungan dengan produsen, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Masih perlunya program yang berorientasi pada kondisi di masing-masing provinsi/daerah, sehingga dalam prospek pengembangannya perlu kedisiplinan program yang berorientasi pada pengembangan ekspor.

c. Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi

Perubahan lingkungan strategis berupa globalisasi ekonomi-liberalisasi perdagangan, urbanisasi dan segmentasi pasar, preferensi konsumen, serta membanjirnya buah impor menuntut perubahan pendekatan beroperasinya organisasi bisnis dan pelaku usaha rantai pasok komoditas buah substitusi impor, di antaranya buah jeruk, avokad, dan lengkeng.

Terdapat lima komponen manajemen rantai pasok (*supply chain management/SCM*) pada masing-masing pelaku rantai pasok komoditas buah substitusi impor yang diidentifikasi, yaitu perencanaan, sumber barang, pengolahan, pengiriman, dan penerimaan barang pada masing-masing rantai pasok komoditas jeruk, apel, avokad, dan lengkeng.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan manajemen rantai pasok komoditas buah substitusi impor Indonesia adalah belum terwujudnya ragam, kuantitas, kualitas, dan kesinambungan pasokan yang sesuai dengan dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen domestik global. Permasalahan tersebut nampak nyata untuk produk buah substitusi impor untuk tujuan pasar modern, konsumen institusional, dan terlebih untuk pasar ekspor. Strategi pengembangan buah substitusi impor harus memperhatikan beberapa aspek berikut: (1) Pentingnya pemahaman agribisnis sebagai suatu sistem dan usaha; (2) Azas-azas penerapan manajemen rantai pasok yang terdiri atas azas sentralitas, azas efisiensi, azas holistik dan terpadu, serta azas kelestarian lingkungan; (3) Pentingnya manajemen mutu dan standarisasi produk buah substitusi impor; (4) Penanganan produk buah substitusi impor sesuai baku kelaziman; (5) Pentingnya dukungan fasilitas transportasi berpendingin; (6) Pentingnya kontrak tertulis dalam manajemen rantai pasok terpadu; (7) Kontinuitas pasokan produk kunci keberlanjutan; (8) Sistem pencatatan basis data dan informasi, terutama aspek teknologi dan pasar; (9) Ketersediaan dan akses terhadap sumber informasi pasar secara cepat; (10) Atribut produk untuk pemenuhan tuntutan konsumen; (11) Pentingnya aspek pengembangan produk dan promosi produk; dan (12) Pentingnya efisiensi pemasaran dalam keseluruhan rantai pasok.

Terdapat 6 (enam) prinsip pengelolaan SCM buah substitusi impor yang efektif, yaitu: (1) difokuskan pada kepuasan kepada pelanggan atau konsumen, (2) menghasilkan produk buah substitusi impor yang berkualitas sesuai dinamika permintaan pasar, segmen pasar dan preferensi konsumen, (3) memastikan logistik dan distribusi buah substitusi impor berjalan secara efektif dan efisien, (4) strategi komunikasi dan informasi antar pelaku rantai pasok buah substitusi impor berjalan secara efektif, (5) membangun manajemen rantai pasok melalui sistem koordinasi yang efektif, dan (6) penciptaan nilai tambah dan berbagi nilai secara adil diantara pelaku rantai pasok.

d. Strategi Keberlanjutan Pengembangan (Kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri

TSP dan TTP merupakan perwujudan NAWA CITA Kabinet Indonesia 2014-2019 yang dianggap bermanfaat untuk memberikan ruang aplikasi, percontohan teknologi pertanian terpadu kepada para ilmuwan serta memberikan pelatihan dan alih teknologi hasil litbang Kementerian/LPNK Ristek, swasta dan perguruan tinggi kepada masyarakat. Sistem pertanian bioindustri pada dasarnya juga merupakan suatu wahana diseminasi inovasi teknologi pertanian dan sebagai media pengkajian partisipatif. Kegiatan bioindustri yang dikembangkan Badan Litbang Pertanian mengusung konsep utuh dimana didalam kawasan tersebut terbentuk sistem pertanian terintegrasi sehingga

terjadi siklus energy, siklus hara, dan siklus biomasa antar sub sistem usaha yang dibantu oleh enzim, mikroba, bakteri sebagai katalisator. Meskipun dalam implementasinya yang dikembangkan lebih fokus pada usaha pertanian integrasi tanaman dan ternak.

Secara umum Peran TSP & TTP dalam diseminasi teknologi belum optimal, terbatas pada kegiatan demplot, pameran & kunjungan pelajar (pasif). Selain itu fungsi TSP tumpang tindih dengan tugas & fungsi bidang KSPP. Kelembagaan pengelola TSP belum ada, masih menjadi bagian dari bidang KSPP atau Kepala KP. Jumlah teknologi inovatif dan produk yang dikembangkan melalui TSP & TTP masih minim, cenderung tidak ada, kemampuan TTP dalam menumbuhkan usaha agribisnis baru cenderung menurun, dan jumlah mitra dalam kawasan pengembangan teknologi inovatif masih sedikit, dan belum ada kontrak kerjasama pengembangan & pemasaran produk inovatif.

Pertanian bio-industri merupakan pertanian ramah lingkungan dengan menganut prinsip *zero-waste*. Pertanian bio-industri akan bermanfaat terhadap pengurangan pencemaran lingkungan, efisiensi usaha tani, dan mendorong pertanian masa depan yang berkelanjutan. Kinerja pertanian bio-industri di lokasi penelitian masih berupa integrasi tanaman-ternak dengan kinerja yang bervariasi. Dari segi penerima manfaat jumlah petani yang menerima manfaat rata-rata menurun. Hal tersebut disebabkan karena beberapa factor seperti : kurangnya pendampingan dari Pemda dan BPTP, minimnya pemahaman konsep dan manfaat pertanian bio-industri, serta kurang dukungan pembiayaan.

Upaya antisipasi untuk mempertahankan keberlanjutan TTP adalah: (i) menetapkan status legalitas TTP dalam organisasi Pemda., (ii) mengembangkan pembiayaan operasional TTP secara mandiri, (iii) memperkuat monitoring dan pendampingan teknis TTP, serta (iv) mengembangkan kerjasama pemasaran produk yang dihasilkan petani. Strategi yang dapat diterapkan untuk keberlanjutan model pertanian bio-industri adalah dengan menerapkan inovasi teknologi bio-industri yang memberikan keuntungan nyata kepada petani dan dapat mengurangi biaya produksi, serta diterapkan pada kelompok petani muda dengan level pendidikan lebih dari Sekolah Dasar.

e. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan

Kemiskinan di pertanian dan perdesaan masih menjadi permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan di Indonesia mengingat jumlah penduduk miskin di desa saat ini sekitar dua kali lipat dari jumlah penduduk miskin di kota. Dengan asumsi basis ekonomi masyarakat desa adalah pertanian, maka bisa dipastikan bahwa sebagian besar dari penduduk miskin di perdesaan tersebut hidup dari sektor pertanian. Artinya, pengurangan kemiskinan di desa dan di sektor pertanian akan berdampak substansial pada penanggulangan kemiskinan

agregat di Indonesia. Oleh karena itu strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan dengan pendekatan multi spectrum melalui program umum dan khusus.

Pembangunan berkelanjutan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan umum, tercermin dari penurunan angka kemiskinan nasional. Kemiskinan di Indonesia bervariasi menurut musim. Tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi pada bulan Maret di bandingkan dengan pada bulan September tahun sebelumnya. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di pedesaan cenderung menurun konsisten dari 17,77 juta orang pada Maret 2014 menjadi 17,54 juta orang pada September 2018. Berdasarkan tingkat nyata dan konsistensi tanda kasualitasnya dengan pengeluaran per kapita maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang valid sebagai determinan kemiskinan rumah tangga usaha pertanian maupun buruh tani ialah jenis kelamin dan lama pendidikan KK, jumlah anggota keluarga, kepemilikan lahan, akses kredit, serta kepemilikan telepon, komputer dan akses internet. Variabel tidak valid sebagai determinan kemiskinan RTUP maupun buruh tani ialah akses listrik dan penabung di lembaga keuangan. Arah kebijakan yang dipandang tepat untuk pengentasan kemiskinan nasional ialah dengan menjadikan pengentasan keluarga tani miskin di pedesaan sebagai prioritas utama. Upaya mempertahankan kemiskinan secara nasional dan menekan kemiskinan di pertanian dan pedesaan berada di satu digit, ragam determinan kemiskinan rumah tangga pertanian di pedesaan yang menunjukkan pengaruh secara valid merupakan input penting bagi pemerintah dalam rangka melakukan intervensi untuk penanggulangan kemiskinan khususnya di pertanian dan pedesaan. Temuan ini mempunyai implikasi penting dalam perumusan rancangan kebijakan Pembangunan Nasional baik sektor pertanian maupun sektor non pertanian, diantaranya terus mendorong program terkait demografi seperti program Keluarga Berencana, membangun sarana prasarana penunjang usaha pertanian seperti akses terhadap lahan yang bisa didukung oleh program keagrariaan seperti TORA (Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Kementan), LP2B (Kementan-PSP), akses kredit, pemberdayaan (utama perempuan), dan teknologi komunikasi.

Rancangan program khusus penanggulangan kemiskinan berbasis pertanian yang perlu memenuhi unsur: terencana-bertahap-berkelanjutan, sasaran dan paket program yang spesifik (pengembangan usaha tani pekarangan pada penerima berbasis lahan, dan alsintan pada penerima berbasis tenaga kerja), dilengkapi pendampingan bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan program mampu memberi *output* dan *outcome* yang lebih signifikan dan terukur. Penanggungjawab program khusus ini sebaiknya ada satu Tim Khusus yang dilegalitas oleh Menteri Pertanian dan dengan kewenangan untuk mendapat dukungan dari instansi yang terkait sesuai paket program.

f. Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional

Pertanian modern yang berorientasi agribisnis memerlukan benih unggul sebagai salah satu sarana produksi. Dengan benih unggul akan diperoleh hasil yang tinggi, kualitas baik, dan seragam dalam hal penampilan tanaman serta umur panen. Ketersediaan benih unggul menjadi sangat penting bagi petani dalam hal jumlah yang memadai, kualitas baik, tepat waktu dan harga terjangkau.

Bantuan benih kentang secara gratis dilakukan oleh Kementerian Pertanian tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian (Puslitbanghorti maupun BPTP) di berbagai provinsi penghasil kentang. Kementerian Pertanian mendorong produksi benih bawang putih melalui program APBN dan wajib tanam oleh importir untuk mencapai swasembada bawang putih tahun 2021. Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Hortikultura menganggarkan Rp 50,557 milyar untuk kegiatan yang meliputi pengembangan system perbenihan buah, perbenihan sayur, sertifikasi benih hortikultura, fasilitasi teknis dukungan perbenihan hortikultura, dan sarana parsarana benih hortikultura. Khusus untuk benih bawang merah, kegiatan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan benih bawang merah bermutu.

BALITSA memberi legalitas kepada produsen benih kentang bersifat eksklusif dengan biaya supervisi yang harus dibayar oleh produsen benih. Impor benih kentang didominasi untuk produksi kebutuhan industri dan seharusnya impor benih varietas Atlantik dan selanjutnya diproduksi di dalam negeri. Kebijakan mengubah kelas benih sebar untuk benih kentang dari G4 menjadi G2 supaya dikembalikan menjadi G4 atau G3. Bantuan benih sayuran berupa benih sebar bersertifikat gratis dari Kementerian Pertanian kepada petani seharusnya melibatkan produsen benih lokal. Perlu pemurnian benih bawang putih dalam skala lebih luas untuk program pengembangan bawang putih secara nasional. Kementerian Pertanian disarankan lebih mendorong benih bawang merah berupa umbi dibanding TSS.

Pembinaan oleh Kementerian Pertanian sebaiknya juga dilakukan kepada pedagang benih selain kepada produsen benih kentang, benih bawang putih, dan benih bawang merah. Pembinaan ditujukan agar produsen benih dapat menjadi supplier yang berhubungan langsung kepada Dinas Pertanian yang melaksanakan program pengadaan benih bantuan kepada petani. Bantuan benih kentang dan bawang merah bersertifikat perlu dikaji ulang karena manfaatnya sangat sedikit dan tidak mendorong petani melakukan adopsi secara swadaya.

g. Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usahatani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembangunan pertanian berbasis pendekatan kawasan telah diputuskan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan pertanian. Pendekatan kawasan diorientasikan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan efisiensi logistik agar kondusif untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, nilai tambah, dan pendapatan petani. Untuk itu dibutuhkan adanya kelembagaan yang efektif untuk mendukung terwujudnya konsolidasi pengelolaan usaha tani (KPUT).

Rancang bangun kelembagaan KPUT meliputi 5 tahapan: (i) analisis masalah, kendala dan prospek, (ii) pembentukan/revitalisasi/penguatan, (iii) manajemen KPUT, (iv) pengembangan, dan (v) pengintegrasian ke kawasan pertanian. Tahap pembentukan/revitalisasi/penguatan KPT meliputi: (a) menentukan wilayah kerja, (b) penguatan koordinasi horizontal dan vertikal antar pemangku kepentingan yang tercakup dalam KPUT, dan (c) sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah. Bentuk dan skala kelembagaan KPUT beragam dan keberhasilan serta keberlanjutannya ditentukan oleh kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi setempat dan mempertimbangkan secara seksama tahapan perancangan. Bentuk dan ukuran kelembagaan/organisasi KPUT yang baik adalah yang efisien tetapi efektif untuk mewujudkan sistem koordinasi horizontal dan vertikal yang kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip usaha ekonomi.

Pengembangan sistem pengelolaan usaha tani yang terkonsolidasi perlu difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama petani, dalam arti tidak harus seragam menyeluruh dari hulu - hilir. Kebijakan dan program yang dibutuhkan mencakup aspek regulasi, pengembangan infrastruktur, bantuan permodalan, bantuan alat dan mesin pertanian, serta kegiatan pendampingan. Dalam program penyaluran bantuan dan kegiatan pendampingan upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran, jenis, jumlah, dan ukuran perlu dilakukan dengan cara meningkatkan porsi pendekatan *bottom up* dalam proses perencanaan.

h. Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan diperlukan upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui optimalisasi lahan rawa dengan cara meningkatkan produktivitas dan meningkatkan indeks pertanaman. Untuk itu, pada tahun 2019 pemerintah mengembangkan lahan rawa melalui Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) di Sumatera Selatan 200 ribu hektare, Kalimantan Selatan 120 ribu hektare, Sulawesi Selatan 33,505 ribu hektare, Lampung 25,604 ribu hektare, dan Kalimantan Tengah 25 ribu hektare.

Selain aspek pengairan, permasalahannya adalah dua upaya yang dilakukan berkonsekuensi terhadap penambahan pembiayaan usaha tani dan menyerap tambahan hasil produksi gabah petani dengan harga layak, sehingga kesejahteraannya meningkat. Kelembagaan Ekonomi Petani yang ada, kinerjanya masih belum sesuai harapan. Petani yang memanfaatkan lembaga pembiayaan formal dan non formal sebagai sumber modal dan mengasuransikan usaha tani padinya masih terbatas. Peminjaman kredit program KUR untuk modal usaha tani masih belum melibatkan banyak petani. Padahal petani bersedia membiayai pinjaman lebih 3% per bulan dengan pola pembayaran saat panen atau YARNEN.

Model korporasi petani yang diciptakan terpisah antara unit manajemen korporasi dengan kelembagaan ekonomi petani yang ada di kawasan. Secara makro dalam lingkup kawasan, kedua komponen merupakan satu kesatuan yang harmonis di bawah koordinasi unit manajemen korporasi petani dan secara bertahap menyatukan unit-unit bisnis unggulan pada KEP serta melakukan perluasan cakupan wilayah kerja.

Ada tiga opsi lembaga korporasi petani di Kawasan SERASI, yaitu: (1) koperasi sekunder yang dibentuk oleh gabungan koperasi primer yang beranggotakan petani individu, yang cikal bakalnya adalah Gabungan Kelompok Tani. Gabungan kelompok tani yang sudah ada saat ini di lokasi SERASI dapat membentuk koperasi primer; (2) Perseroan Terbatas yang didirikan oleh seluruh koperasi primer (jelmaan Gabungan Kelompok Tani) yang ada di wilayah pengembangan SERASI. Pemilik PT atau pemegang saham PT adalah koperasi primer yang sejatinya beranggotakan seluruh petani; dan (3) bentuk PT, hanya saja kepemilikan modalnya adalah gabungan dari modal yang dimiliki oleh para petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani atau koperasi primer di wilayah kawasan koperasi dan modal yang berasal dari luar kawasan SERASI. Pilihan lembaga dari luar adalah PT. Mitra BUMDES Nusantara (PT. MBN) dengan kepemilikan saham petani (Gapoktan & BUMDES) 51% dan PT. MBN 49%.

i. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan

Salah satu sasaran strategis Kementerian Pertanian pada periode tahun 2015–2019 adalah berkembangnya produk yang bernilai tambah dan berdaya saing. Perkembangan industri pengolahan hasil pertanian diharapkan akan mendorong upaya pengembangan nilai tambah produk pertanian. Namun, dalam praktiknya pengembangan nilai tambah hasil pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dan kendala sehingga belum berjalan dengan optimal.

Dengan terus menurunnya produksi kakao Indonesia, meningkatnya kebutuhan bahan baku industri kakao, meningkatnya peluang pasar kakao dan produk-olahan kakao di dunia, dan target peningkatan ekspor kakao tiga kali

lipat dalam lima tahun ke depan, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produksi biji kakao yang berkualitas dan produk olahan kakao, seperti melanjutkan kembali Program Gernas Kakao/Pengembangan Kakao Berkelanjutan, mendorong peran industri pengolahan kakao dalam pembinaan dan kemitraan dengan petani kakao, termasuk jaminan pasar dan harga bagi kakao berkualitas yang dihasilkan petani, mendorong perluasan sertifikasi kakao internasional seperti UTZ/RA dan organik (EU dan USDA) untuk meningkatkan peluang akses terhadap pasar internasional, penguatan kelembagaan petani, baik kelompok tani maupun Gapoktan yang menjadi payungnya serta koperasi yang menjadi badan hukum Gapoktan, mendorong penumbuhan dan pengembangan industri pengolahan kakao yang selain dapat meningkatkan nilai tambah kakao, juga dapat menjadi *demand driven* bagi kakao fermentasi dengan melalui kemitraan, termasuk jaminan pasar dan harga yang layak bagi biji kakao fermentasi yang dihasilkan petani, penumbuhan industri pengolahan kakao skala kecil oleh pemerintah, alternatif strategi pengembangan industri pengolahan kakao, dukungan kebijakan terkait penyerapan produksi kakao lokal dan olahannya, pengkajian kembali kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat peningkatan produksi dan produktivitas kakao oleh petani dan peningkatan produksi hasil olahan kakao, seperti PPN produk primer 10%, bea masuk biji kakao impor 5%, bea masuk produk antara kakao 0%, serta rekonsiliasi data antara Kementan, ICCO, dan AIKI sehingga target-target yang ditetapkan dan kebijakan-kebijakan/program-program yang dilakukan berbasiskan data yang lebih akurat.

Dalam upaya mendukung peningkatan nilai tambah cabai merah diperlukan kebijakan-kebijakan dalam aspek budi daya, pascapanen, aspek pemasaran, dan aspek pengolahan. Peningkatan nilai tambah pada aspek budi daya, pascapanen, pemasaran, dan pengolahan akan bermanfaat bagi petani bila didukung oleh kebijakan pemerintah mengatur importasi cabai kering. Diperlukan upaya untuk menurunkan biaya produksi cabai merah sehingga usaha petani dan pengolah lebih efisien dan dapat berdaya saing dan ekspor cabai olahan (bubuk, sambal) dapat ditingkatkan.

j. Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024

Renstra Kementerian Pertanian (2015-2019) menyebutkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Persoalan mendasar yang masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang dan pada periode 2015-2019, mencakup: (1) Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; (2) infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; (3) kepemilikan lahan yang sempit; (4) sistem perbenihan dan perbibitan nasional; (5) akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; dan (6) keterpaduan antar sektor atau koordinasi serta sinergi antar sektor. Selain itu, tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian juga terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan lingkungan strategis global.

Dalam mendukung peningkatan produksi padi, ketika menghadapi perubahan iklim yang ekstrim maka diperlukan upaya antisipasi yang baik melalui upaya khusus penanggulangan kekeringan. Kebijakan hilirisasi produk jagung menjadi poin penting dalam menopang misi menjadi lumbung pangan dunia. Orientasi pemasaran jagung tidak hanya ditujukan sebagai bahan baku saja (produk primer), namun ke depan pemasaran hasil harus berupa hasil produk olahan. Dalam rangka pencapaian swasembada Kedelai diperlukan prasyarat yaitu: kebijakan harga pembelian pemerintah, penetapan tarif impor kedelai minimal sebesar 10%, jaminan harga pasar melalui peran aktif bulog, tersedianya tambahan lahan untuk perluasan areal tanam; adanya insentif dari pemerintah untuk petani pelaksana budidaya kedelai; dan perbaikan kelembagaan perbenihan nasional. Peningkatan produksi dan produktivitas cabai merah dan bawang merah secara nyata hanya dapat dilakukan dengan inovasi teknologi baru dan perencanaan tanam yang tepat. Terobosan inovasi teknologi baru dapat difokuskan pada penggunaan benih unggul lokal dan hibrida tersertifikasi, teknologi pemupukan secara lengkap dan berimbang, penggunaan pupuk organik, teknologi pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penanganan pasca panen yang prima. Perencanaan tanam harus didasarkan pada dinamika permintaan pasar. Dalam rangka peningkatan daya komoditas lada dan kopi, diperlukan kebijakan/strategi penguatan sistem agribisnis, yang dilakukan melalui: pengembangan komoditas dengan cara perluasan areal pada lahan yang sesuai dengan menggunakan teknologi rekomendasi, peningkatan daya saing dan peningkatan peran kelembagaan mulai dari kelembagaan di tingkat petani sampai kelembagaan pemasaran hasil yang berpihak kepada petani.

Arahan kebijakan Pertanian saat ini untuk mewujudkan Pertanian Maju Mandiri dan Modern. Untuk mewujudkan dilakukan dengan 4 hal yaitu: (1). mekanisasi dan penelitian, (2). pertanian biaya rendah, (3). ekspansi pertanian dan (4). peningkatan produksi dan produktivitas. Terdapat beberapa program yang dicanangkan dengan manajemen pengelolaannya secara Korporasi, dan pengembangannya secara Terintegrasi, Maju, Modern dan Mandiri.

k. Evaluasi Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao

Program asuransi pertanian adalah salah satu instrumen perlindungan petani, seperti asuransi usaha tani padi (AUTP) dan sapi/kerbau (AUTS/K) yang sudah dilaksanakan sejak 2015 dan terbukti mampu melindungi petani dari kerugian karena risiko kerusakan tanaman/kegagalan panen atau kematian ternak. Evaluasi terhadap program asuransi pertanian diperlukan untuk meningkatkan kinerja program ini diwaktu yang akan datang.

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian, hingga saat ini pemerintah telah melakukan perlindungan usahatani terhadap beberapa komoditas pertanian penting dan sekaligus prioritas di sub sektor tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko kegagalan usahatani maupun usaha ternak. Jumlah peserta AUTP hampir mencapai target pelaksanaan (99,80%) terjadi pada tahun 2017, walaupun pada tahun sebelumnya (2016) juga hampir mencapai luasan lahan yang ditargetkan (99,99%), karena pada tahun tersebut terjadi pengurangan anggaran sehingga menyebabkan perubahan target luasan yang ditetapkan. Pelaksanaan AUTP dan AUTS/K selama masa uji coba 5 tahun, telah menunjukkan respon dan keikutsertaan para petani sebagai peserta AUTP maupun AUTS/K sekalipun belum mencapai target dan realisasinya masih bervariasi antar provinsi maupun kabupaten, termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi selama masa masa uji coba tersebut. Kegiatan asuransi agar disinergikan dengan program lain sehingga kepesertaan petani meningkat. Contoh, integrasi program kartu tani dengan asuransi pertanian dapat mengefisienkan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, program bantuan lain, baik yang berasal dari pusat, maupun inisiatif pemerintah daerah diusulkan agar mengintegrasikannya dengan skim AUTP.

Inisiasi dan perencanaan untuk AUTT dan AUTKa, direspon positif oleh para petani dan pelaku terkait, karena selama ini terkendala dengan aspek permodalan dan risiko yang dihadapi para petani dalam mengusahakan komoditas tebu dan kakao, sehingga skim asuransi untuk dua komoditas tersebut sangat diharapkan dapat diimplementasikan. Program asuransi pertanian perlu terus disosialisasikan secara masif dan berkelanjutan kepada petani oleh petugas pusat Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota, Penyuluh, UPTD dan Jasindo.

l. Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan

Penelitian Dinamika Ekonomi Perdesaan atau Penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) yang menghasilkan analisis secara panel dapat dipandang

sebagai instrument monitoring dan evaluasi kebijakan dan program-program pembangunan pertanian. Perubahan lingkungan strategis secara dinamis selama rentang waktu 10 tahun menghendaki perlunya evaluasi hasil dan dampak pembangunan pertanian dan perdesaan selama ini guna menentkan arah kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan ke depan.

Dinamika indikator-indikator ekonomi dan perdesaan dirangkum dari hasil penelitian Patanas di berbagai wilayah dengan perbedaan agroekosistem dari data panel mikro tiga titik waktu. Agroekosistem (AE) lahan sawah irigasi dengan komoditas padi di lima provinsi meliputi 14 desa pada periode waktu 2007, 2010, 2016. AE lahan kering komoditas palawija dan komoditas sayuran, studi dilakukan di lima provinsi pada 8 desa pada periode waktu 2008, 2011, 2017. Pada AE lahan kering berbasis perkebunan, studi dilakukan di lima provinsi pada delapan desa pada periode waktu 2009, 2012, 2018.

Kebijakan terkait dengan lahan pertanian pada tataran makro dan meso, dibutuhkan strategi dan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan potensi cadangan lahan pangan/pertanian, pencetakan lahan pertanian baru dan infrastruktur pendukungnya termasuk irigasi, perlindungan kawasan pertanian abadi termasuk akselerasi perumusan kebijakan operasional pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, penguatan kelembagaan lokal dan pengelolaan lahan komunal. Disamping itu dibutuhkan pula pengendalian *land grabbing* dan HGU yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan esensi lahan sebagai komoditas langka. Program reforma agraria tetap harus diupayakan seperti redistribusi lahan, program transmigrasi, dan konsolidasi lahan dikomplemen dengan kebijakan pendukungnya (*non-land reform*) seperti ketersediaan dan akses infrastruktur.

Pada aspek kesejahteraan rumah tangga petani, disarankan tiga pilihan peta jalan untuk membawa rumah tangga tani keluar dari kemiskinan. Pertama, upgrading usaha tani dengan meningkatkan skala, efisiensi dan diversifikasi usahatani melalui program penguatan dan modernisasi usaha pertanian. Kedua, alih pekerjaan dan/atau usaha dengan menarik buruh tani dan petani gurem bekerja dan atau mendirikan usaha di sektor non pertanian di perdesaan melalui program agroindustrialisasi perdesaan. Ketiga, migrasi atau urbanisasi dan alih pekerjaan atau usaha dengan menarik buruh tani dan petani gurem keluar dari pedesaan untuk kemudian bekerja dan atau berusaha di sektor formal di perkotaan melalui program peningkatan konektivitas desa-kota. Strategi yang disarankan memuluskan ketiga jalur di atas ialah mengelola transformasi pembangunan nasional berporos transformasi pertanian.

Pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, dicapai melalui 18 kegiatan analisis kebijakan (Anjak). Kegiatan Anjak yang target awalnya adalah menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu kebijakan aktual, hingga akhir tahun 2019 menghasilkan 18

rekomendasi kebijakan, lebih besar dari target yang ditetapkan, dengan topik sebagai berikut:

1. Evaluasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedele (UPSUS PAJALE)
2. Evaluasi Program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)
3. Evaluasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)
4. Evaluasi Program Optimalisasi Alat dan Mesin Pertanian (OPSIN)
5. Evaluasi Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI)
6. Evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
7. Desain Pengembangan Penyangga Pangan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur
8. Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk Pertanian
9. Konsep dan Perhitungan Nilai Tukar Sebagai Alternatif Perbaikan Nilai Tukar Barter-BPS
10. Studi Rancang Bangun Kelembagaan Petani Mendukung Program "Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI)"
11. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Non Tunai BPNT dan Implikasinya terhadap Manajemen Cadangan Beras Pemerintah
12. Dampak Perang Dagang China vs Amerika Serikat terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia
13. Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Ternak Kambing/Domba
14. Identifikasi Potensi Ekspor Komoditas Pertanian
15. Kebijakan Pengelolaan Subsidi Pupuk yang meliputi aspek pengelolaan, harga eceran tertinggi, potensi pengalihan anggaran dari BA 999 ke BA 018
16. Kebijakan Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah
17. Potensi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen dan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian.
18. Peningkatan Efektivitas Kinerja Penyuluhan Pertanian dalam Menjamin Operasionalisasi Kostratani

Pelaksanaan kegiatan Anjak tersebut bersifat khusus, yakni penugasan penelitiannya secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2019. Peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan Anjak tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik penelitian yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah **92,39%** dari target Pagu **Rp1.711.800.000,-**.

2. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sasaran Kegiatan Kedua, yakni “Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian”, yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik PSEKP. Pencapaian target sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019

| Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan | Target | Realisasi | % |
|---|----------------------|-----------------------|-------|
| 2.1. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 3,5 skala likert 1-4 | 3,23 skala likert 1-4 | 92,29 |

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Untuk melihat bagaimana kualitas layanan publik yang diberikan, Kementerian Pertanian melakukan survei masyarakat untuk melihat penilaian masyarakat terhadap layanan publik yang diterima (*perceived benefit*) dari PSEKP. Indikator kinerja nilai kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan PSEKP. IKM diukur melalui survei yang dilakukan secara sistematis minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pengukuran IKM Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dilakukan dengan menggunakan kuesioner instrumen bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Jawaban pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala *likert* (1 – 4), sehingga jawaban pertanyaan akan mencerminkan tingkat mutu layanan dari tidak baik sampai dengan sangat baik. Penetapan responden ditentukan secara acak. Interval hasil penilaian IKM dapat dilihat pada Tabel 9.

Target indikator kinerja IKM PSEKP tahun 2019 adalah sebesar 3,5 dengan realisasi sebesar 3,23. Hal ini berarti capaian kinerja IKM sebesar 92,29%, sehingga masuk kategori berhasil. Data diperoleh dari 183 responden dengan sembilan pertanyaan, range nilai antara 3,14 – 3,36. Realisasi IKM tahun 2019 lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,22. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat PSEKP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013.

Tabel 9. Interval Hasil Penilaian IKM

| Nilai Persepsi | Nilai Interval IKM | Nilai Interval Konversi IKM | Mutu Pelayanan | |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1,00 - 1,75 | 25,00 - 43,75 | D | Tidak Baik |
| 2 | 1,76 - 2,50 | 43,76 - 62,50 | C | Kurang Baik |
| 3 | 2,51 - 3,25 | 62,51 - 81,25 | B | Baik |
| 4 | 3,26 - 4,00 | 81,26 - 100,00 | A | Sangat Baik |

Unsur -unsur pengukuran IKM tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian persyaratan dalam pengurusan pelayanan;
- 2) Prosedur pelayanan;
- 3) Ketepatan waktu pelayanan);
- 4) Kewajaran biaya pelayanan;
- 5) Hasil pelayanan;
- 6) Kemampuan petugas dalam pemberian pelayanan;
- 7) Kesopanan dan keramahan petugas;
- 8) Pelaksanaan maklumat pelayanan;
- 9) Tindak lanjut pengaduan;

Pengukuran IKM dilakukan terhadap 5 (lima) jenis layanan publik PSEKP tahun 2018, yaitu:

- 1) Layanan informasi dan hasil-hasil penelitian
- 2) Layanan data hasil penelitian dan pengolahannya
- 3) Layanan perpustakaan
- 4) Layanan kerja sama penelitian/kajian
- 5) Layanan Bimbingan penelitian, magang dan PKL pelajar dan mahasiswa

Kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKM) PSEKP terhadap 5 (lima) jenis layanan publik PSEKP tahun 2019, antara lain:

- 1) Petugas layanan memberi kemudahan persyaratan pada pengguna layanan ketika akan memanfaatkan layanan.
- 2) Petugas layanan tidak menerapkan prosedur yang berbelit.
- 3) Petugas layanan selalu berupaya memenuhi permintaan pengguna layanan tepat waktu.
- 4) Petugas layanan berupaya membantu pengguna layanan semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.
- 5) Petugas layanan selalu bersikap santun pada pengguna layanan.
- 6) Petugas layanan menerapkan SOP dalam memberikan layanan.
- 7) Sebagai penyelenggara layanan, pihak manajemen terbuka menerima kritik dan masukan untuk perbaikan.

- 8) Manajemen selalu merespon ketika pengguna layanan melakukan pengaduan.

Selain mengukur indeks kepuasan masyarakat seperti tahun 2018, maka pada tahun 2019 juga dilakukan **pengukuran Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan PSEKP**. PSEKP dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan umum, program dan evaluasi, kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, serta kelompok jabatan fungsional yang diwadahi dalam kelompok peneliti yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai unit kerja yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian dan diseminasi hasil penelitian di lingkup Kementerian Pertanian serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, PSEKP membutuhkan sumber daya yang memadai dan SDM yang kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

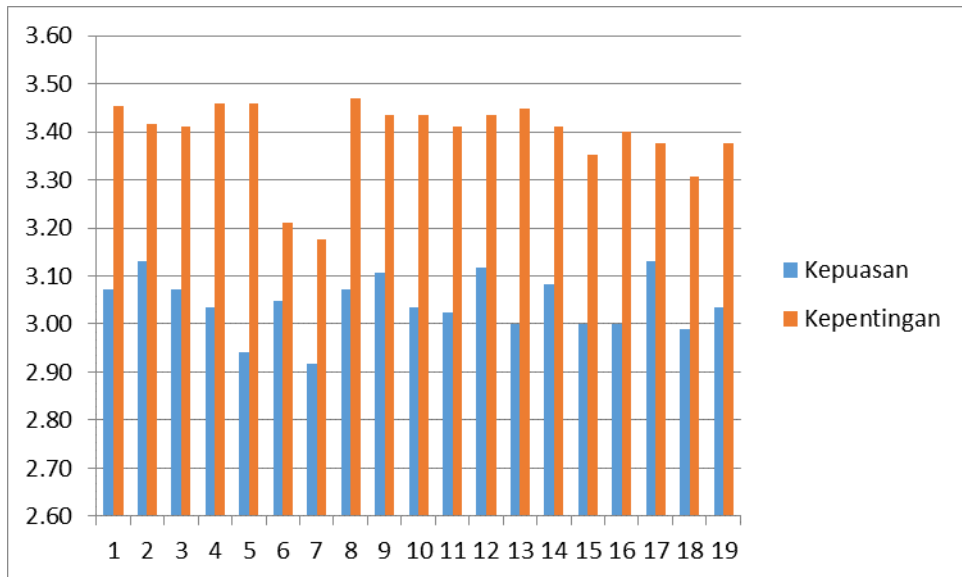
Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan PSEKP mulai diterapkan pada Tahun 2019 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan. Survei dilakukan dengan mendistribusikan kuisisioner ke seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh PSEKP. Isian kuisisioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan diawali dengan melakukan pembobotan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner tersebut. Kuisisioner yang diajukan terdiri dari 19 (sembilan belas) pertanyaan dengan metode penilaian menggunakan skala *likert* yang terdiri dari empat pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Puas (SP) hingga Tidak Puas (P). Empat pilihan tersebut adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Kurang Puas (KP) dan Tidak Puas (TP). Komponen penilaian yang terdapat dalam kuisisioner mencakup: kualitas pelayanan bagian umum, program dan evaluasi, kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian, serta jabatan fungsional, termasuk di dalamnya konsistensi waktu dan sikap SDM PSEKP pada saat memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil pengolahan data, dari jumlah 95 responden yang mengisi kuisisioner layanan PSEKP, data yang dianalisis sebanyak 84 responden, 11 responden dianulir karena banyak data yang kosong. Hasil pengolahan data diperoleh **nilai kepuasan sebesar 3,04**. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PSEKP.

Kepuasan kualitas pemberian layanan oleh PSEKP diukur melalui *survey* dengan model kualitas jasa *Service Quality* (Servqual) yaitu terdapat 5 dimensi penilaian diantaranya *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy*. Model Servqual mengasumsikan bahwa konsumen membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut yang relevan dengan standar ideal/sempurna. Apabila

kinerja jasa sesuai atau melebihi standar maka persepsi kualitas jasa secara keseluruhan akan positif begitupun sebaliknya. Jadi model Servqual menganalisis kesenjangan antara jasa yang diharapkan/ kepentingan dan jasa yang dipersepsikan/kepuasan.

Keputusan : Kualitas jasa/pelayanan yang diharapkan konsumen

Keputusan : Fakta kualitas jasa/layanan yang dirasakan



Gambar 4. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2019

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Untuk mencapai Sasaran kegiatan ketiga yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan PSEKP diukur dengan tiga indikator sasaran kegiatan :

- Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang
- Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang
- Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015)

Pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja pada Sasaran-3 tersebut dipaparkan pada Tabel 10. Target indikator jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang tahun 2019 adalah tidak ada temuan, sedangkan target indikator jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan PSEKP yang terjadi berulang tahun 2019 adalah satu temuan yang berulang.

Tabel 10. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|-------------|-------------|------|
| 3.1. Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 0,00 Temuan | 0,00 Temuan | 100 |
| 3.2. Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 1,00 Temuan | 0,00 Temuan | >100 |
| 3.3. Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) | 1,00 Temuan | 0,00 Temuan | >100 |

Temuan BPK/Itjen yang dimaksud adalah temuan BPK/Itjen terkait pengelolaan keuangan yang seperti diamanatkan pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sementara itu yang dimaksud kategori temuan yang berulang adalah kelompok temuan BPK/Itjen yang menjadi temuan berulang selama 2 (dua) tahun berturut – turut (contoh: Temuan dengan kelompok temuan pelaporan keuangan yang berulang dan temuan dengan kelompok temuan belanja dan pengadaan yang berulang). Selama tahun 2019 tidak dijumpai baik temuan BPK maupun Itjen tahun 2018 yang berulang pada tahun 2019. Sepanjang tahun 2019 telah dilakukan strategi-strategi dalam rangka tidak terjadi temuan BPK/Itjen yang berulang selama dua tahun berturut-turut, sebagai berikut:

- a. Penguatan etika dan integritas aparatur;
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan kapasitas operator, verifikator, dan Tim Reviu melalui sosialisasi, dan bimtek;
- d. Mengoptimalkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai kewenangannya melakukan reviu Laporan Keuangan tahun 2018;
- e. Pemanfaatan aplikasi Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) untuk pengolahan data penyusunan laporan keuangan;
- f. Pemanfaatan aplikasi e-rekon dan LK untuk monitoring permasalahan yang muncul di e-rekon dan LK untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya;
- g. Penyediaan dana yang cukup untuk penyelesaian permasalahan laporan keuangan dan aset;
- h. Monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK RI secara kontinu;
- i. Melakukan inventarisasi permasalahan menyeluruh menghindari temuan berulang;
- j. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai pembina SPI lingkup Kementan;

- k. Mengoptimalkan peran verifikasi Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan Keuangan untuk meyakini keandalan Laporan Keuangan yang disusunnya sesuai dengan Panduan Verifikasi Laporan Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;

Target indikator jumlah temuan Itjen atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terjadi berulang tahun 2019 sebanyak 1 (satu) temuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015, imlementasi SAKIP tersebut dilakukan terhadap 5 (lima) aspek; yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Selama tahun 2019 tidak terjadi temuan Itjen atas implementasi 5 aspek SAKIP yang berulang.

Pada tahun 2019 kegiatan yang diupayakan untuk mendukung implementasi SAKIP PSEKP antara lain:

- a. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019;
Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.
Penyusunan PK lingkup PSEKP dilakukan mulai dari level eselon II hingga level eselon IV. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- b. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja PSEKP;
Pada tahun 2019 pengisian capaian indikator kinerja dilakukan setiap bulan secara elektronik melalui web eSAKIP Kementerian Pertanian.
- c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup PSEKP tahun 2019 berdasarkan PK yang sudah disusun sebelumnya.

Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran kegiatan yang dicapai PSEKP sampai akhir tahun 2019 secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan oleh PSEKP telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian

sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan penelitian untuk mencapai **sasaran kegiatan pertama** dilengkapi dengan materi penelitian, seperti proposal operasional, juklak (petunjuk pelaksanaan penelitian), outline penelitian, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Tercapainya **sasaran kegiatan kedua** tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan PSEKP telah berjalan secara efektif dan efisien. Tercapainya **sasaran kegiatan ketiga** karena kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama pada saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSEKP tahun 2018. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu penentu tercapainya sasaran kegiatan PSEKP yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut adalah:

- a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya.
- b) Dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. Sarana kegiatan penelitian yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: fasilitas komputer, jaringan internet, ruangan ber-AC, perpustakaan, sarana kendaraan, dan lain-lain.
- c) Dukungan dan koordinasi manajemen dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan laporan keuangan, dan implementasi SAKIP di lingkup PSEKP

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan terutama kegiatan penelitian antara lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian

Pertanian seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar negeri seperti IDRC. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2019, antara lain: (1) Penumpukan kegiatan penelitian pada waktu bersamaan, baik penelitian yang sumber dananya dari APBN/DIPA dan penelitian kerja sama lainnya, sementara SDM peneliti relatif terbatas; (2) Adanya revisi anggaran yang menyebabkan kegiatan penelitian menjadi terhambat dan perlu penyesuaian terhadap perubahan anggaran tersebut; (3) Adanya keterlambatan peneliti dalam menyerahkan kuesioner penelitian setelah kembali dari lapang; dan (4) Tingkat validasi data kuesioner yang bervariasi, baik kurang akurat dalam pengisian kuesionernya atau kesalahan entri data (*human error*).

Hal tersebut di atas menjadi faktor penghambat penulisan pelaporan akhir dan mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyelesaikan tahapan penelitian. Selain itu, penyerapan anggaran di seluruh kegiatan penelitian PSEKP belum dapat terserap secara optimal.

Permasalahan

Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP adalah masih adanya kesenjangan kapasitas peneliti junior dengan senior karena jenjang pendidikan formal maupun pengalaman dalam kegiatan penelitian. Kesenjangan terutama mencakup kapasitas dalam membuat proposal penelitian yang baik, penguasaan metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis hasil pengolahan data terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pertanian.

Pada tingkat penelusuran data di lapang, permasalahan yang kerap kali ditemui dalam pelaksanaan kegiatan PSEKP adalah validitas dan kelengkapan data serta informasi di daerah kurang baik seiring dengan adanya era otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Padahal penelitian sosial ekonomi pertanian disamping menggunakan data primer juga mengandalkan data sekunder. Beberapa permasalahan yang ditemui di lapang antara lain adalah sebagian responden (misalnya produsen benih, pengusaha di bidang pertanian) tidak bersedia untuk

mengisi kuesioner yang disiapkan, data sekunder tingkat kecamatan yang dibutuhkan sulit diperoleh, dokumen dan informasi serta data pendukung yang dibutuhkan di lapang tidak lengkap atau bahkan tidak tersedia di lapang. Di sisi lain, beberapa tim juga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memperoleh database yang valid dan akurat.

Langkah-Langkah Inisiatif Yang Diambil

Untuk mengantisipasi permasalahan kesenjangan kapabilitas peneliti, maka upaya yang dilakukan adalah memperkuat kelompok peneliti (Kelti) sehingga keberadaan Kelti PSEKP dapat meningkatkan kinerja PSEKP sebagai lembaga penelitian. Selain itu, juga perlu dilakukan pelatihan yang rutin dalam peningkatan kemampuan peneliti di bidang pengembangan instrumen penelitian/metodologi, analisis data, dan pembuatan proposal penelitian yang baik.

Untuk mengatasi permasalahan akurasi data dan informasi di tingkat lapangan, baik data primer maupun sekunder, tim peneliti umumnya melakukan pencarian data dari berbagai sumber/instansi lain yang terkait. Validitas dan akurasi data dan informasi sangat penting dan memengaruhi kualitas hasil kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang paling mutakhir.

Capaian Kinerja Utama PSEKP

Selama periode Renstra PSEKP 2015-2019, indikator kinerja utama PSEKP mengalami perubahan. Kinerja Utama PSEKP periode dan 2015-2017, diukur dari tersedianya jumlah rekomendasi kebijakan bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian, mengingat hal tersebut merupakan Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program atau kegiatan. Periode tahun 2018-2019, dilakukan penyempurnaan terhadap indikator kinerja utama tersebut. Mengingat adanya perbedaan indikator kinerja utama dalam dua periode tersebut, maka capaian kinerja PSEKP tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja periode 2015-2017. Capaian kinerja utama PSEKP pada periode 2015-2017 menunjukkan jumlah rekomendasi yang

dihasilkan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang di tetapkan setiap tahun (Tabel 11).

Tabel 11. Perbandingan Keluaran/*Output* Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2015-2019

| Uraian | Rekomendasi Kebijakan | | | | |
|---------------------|-----------------------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Capaian | 33 | 26 | 25 | 25 | 30 |
| Tingkat Capaian (%) | 150 | 118 | 114 | 114 | 136 |

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 adalah 110 rekomendasi kebijakan atau target per tahun sebanyak 22 rekomendasi kebijakan, terdiri dari 12 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian reguler yang sudah ditentukan dan 10 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Realisasi kinerja kegiatan selama tahun 2015 adalah 33 rekomendasi (150%), tahun 2016 adalah 26 rekomendasi (118%), tahun 2017 dan tahun 2018 adalah 25 rekomendasi (114%). Pada tahun 2018, realisasi kegiatan adalah 25 rekomendasi (114%). Realisasi kegiatan pada tahun 2019 adalah 30 rekomendasi (136%). Realisasi yang lebih tinggi dari target ini disebabkan oleh adanya capaian target output tentang jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan sosial ekonomi pertanian yang semula ditargetkan 10 rekomendasi kebijakan, tapi selama tahun berjalan terealisasi hingga 13 rekomendasi kebijakan pada tahun 2017 dan 2018 dan 14 rekomendasi kebijakan pada tahun 2019. Sampai dengan tahun kelima periode renstra 2015-2019, capaian realisasi kinerja sebesar 139 rekomendasi kebijakan (126%) dari 110 rekomendasi kebijakan yang ditargetkan. Namun demikian, terlepas dari capaian target yang diperoleh, yang lebih penting adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatannya oleh stakeholder meningkat.

Semua kegiatan penelitian tidak terlepas dari adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol atau pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu, juga adanya dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan

data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian terhadap kegiatan penelitian.

Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di tingkat petani yang paling mutakhir.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Anggaran PSEKP tahun 2019 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: Kegiatan utama mencakup Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan Penunjang yang mencakup: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) Pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) Perawatan sarana.

Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2019 adalah Rp35.311.327.000,- yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp11.648.299.000,-; (2) Belanja Barang Rp18.495.527.000,- dan (3) Belanja Modal Rp3.391.485.000,-. DIPA PSEKP 2019 mengalami revisi karena penambahan anggaran hibah dalam bentuk uang berupa belanja barang bersumber dari ACIAR dan FAO sebesar Rp1.776.016.000,-. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2019 periode 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa, realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp34.258.432.788,- (97,02%), terdiri dari belanja pegawai yang sudah direalisasikan Rp11.560.656.452,- (99,25%), sementara untuk belanja barang yang sudah direalisasikan Rp19.380.629.715,- (95,61%), dan realisasi untuk belanja modal Rp3.317.146.621,- (97,81%). Dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2019 adalah Rp1.052.894.212,- (2,98%).

Perkembangan Pelaksanaan kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2019 per 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa capaian fisik mencapai 100%, demikian pula dengan capaian serapan keuangan mencapai 97,02% (Tabel 12 dan 13). Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi, capaian kegiatannya terserap

Rp6.431.707.652,- (96,09%) dari pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp6.693.075.000,-. Kendala utama capaian serapan tersebut karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan adanya revisi anggaran sebanyak tujuh kali. Selanjutnya rincian keuangan menurut sasaran dan program pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 14.

Anggaran keuangan pada Tabel 13 tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang terkait dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program utama yang diselenggarakan di PSEKP, yakni: Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 15.

Tabel 12. Perkembangan Pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2019

| Kode | Jenis Pengeluaran | Pagu (Rp) | Realisasi | | Sisa Anggaran | |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | Rp | % | Rp | % |
| 51 | Belanja Pegawai | 11.648.299.000 | 11.560.656.452 | 99,25 | 87.642.548 | 0,75 |
| 52 | Belanja Barang | 20.271.543.000 | 19.380.629.715 | 95,61 | 890.913.285 | 4,39 |
| 53 | Belanja Modal | 3.391.485.000 | 3.317.146.621 | 97,81 | 74.338.379 | 2,19 |
| | Jumlah | 35.311.327.000 | 34.258.432.788 | 97,02 | 1.052.894.212 | 2,98 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2019)

Tabel 13. Realisasi Anggaran per Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2019

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | PAGU (Rp) | TARGET (Rp) | REALISASI | | SALDO ANGGARAN | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| | | | | Rp | % | Rp | % |
| 4992 | Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 35.311.327.000 | 35.311.327.000 | 34.258.432.788 | 97,02 | 1.052.894.212 | 2,98 |
| 4992.001 | Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian | 16.598.091.000 | 16.598.091.000 | 15.829.455.394 | 95,37 | 768.635.606 | 4,63 |
| | 005. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 2.219.061.000 | 2.219.061.000 | 2.025.906.527 | 91,30 | 193.154.473 | 8,70 |
| | 051. Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Dinamika Pembangunan Pertanian | 6.693.075.000 | 6.693.075.000 | 6.431.707.652 | 96,09 | 261.367.348 | 3,91 |
| | 052. Layanan Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-isu Aktual Pembangunan Pertanian | 1.711.800.000 | 1.711.800.000 | 1.581.552.367 | 92,39 | 130.247.633 | 7,61 |
| | 011. Layanan Internal Organisasi | 5.974.155.000 | 5.974.155.000 | 5.790.288.848 | 96,92 | 183.866.152 | 3,08 |
| 4992.951 | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 3.391.485.000 | 3.391.485.000 | 3.317.146.621 | 97,81 | 74.338.379 | 2,19 |
| 4992.994 | Layanan Perkantoran | 15.321.751.000 | 15.321.751.000 | 15.111.830.773 | 98,63 | 209.920.227 | 1,37 |
| | 001. Gaji dan Tunjangan | 11.648.299.000 | 11.648.299.000 | 11.560.656.452 | 99,25 | 87.642.548 | 0,75 |
| | 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 3.673.452.000 | 3.673.452.000 | 3.551.174.321 | 96,67 | 122.277.679 | 3,33 |

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan PSEKP (2019)

Tabel 14. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Penelitian menurut Sasaran Kegiatan Pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2019

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN | KEGIATAN | TARGET | | REALISASI | |
|---|--|--|---|---|---------------|--------|
| | | | Rupiah | % | Rupiah | % |
| Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan | Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan | 1. <i>Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani</i> | 404.895.000 | 100,00 | 396.550.245 | 97,94 |
| | | 2. <i>Strategi Pengembangan Ekspor dalam Mendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani</i> | 398.220.000 | 100,00 | 395.766.275 | 99,38 |
| | | 3. <i>Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi</i> | 398.730.000 | 100,00 | 375.117.273 | 94,08 |
| | | 4. <i>Strategi Keberlanjutan Pengembangan (Kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri</i> | 367.620.000 | 100,00 | 338.960.925 | 92,20 |
| | | 5. <i>Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan</i> | 397.845.000 | 100,00 | 377.783.327 | 94,96 |
| | | 6. <i>Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional</i> | 390.160.000 | 100,00 | 385.545.434 | 98,82 |
| | | 7. <i>Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usahatani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura</i> | 363.850.000 | 100,00 | 350.453.575 | 96,32 |
| | | 8. <i>Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI</i> | 376.810.000 | 100,00 | 354.914.796 | 94,19 |
| | | 9. <i>Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan</i> | 394.080.000 | 100,00 | 394.080.000 | 97,22 |
| | | 10. <i>Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024</i> | 382.345.000 | 100,00 | 349.305.377 | 91,36 |
| | | 11. <i>Evaluasi Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao</i> | 397.424.000 | 100,00 | 358.314.825 | 90,16 |
| | | 12. <i>Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan</i> | 645.080.000 | 100,00 | 628.758.932 | 97,47 |
| | | | Jumlah layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian | <i>Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian</i> | 1.711.800.000 | 100,00 |

Tabel 15. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2019

| Kode Program | Program Utama | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|--------------|---|--------------------|----------------|----------------|
| 001 | Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan | 6.628.859.000 | 6.276.129.601 | 94,68 |
| 951 | Terwujudnya jalinan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) | 348.400.000 | 302.672.500 | 86,88 |
| 994 | Terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian | 1.870.661.000 | 1.723.234.027 | 92,12 |

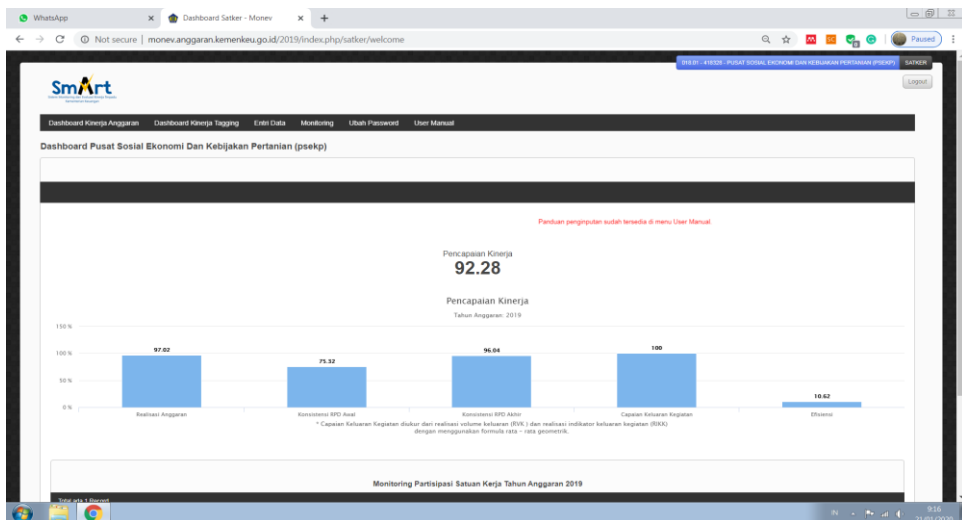
Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2019 hanya diperoleh dari penerimaan umum yakni **Rp73.110.000,-** sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 16). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible* dan ditujukan bagi *stakeholder/pemangku* kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIN ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Tabel 16. Capaian PNPB Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2019

| KODE MAK | URAIAN MAK | PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN (Rp.) | PENERIMAAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SISA TARGET PENERIMAAN (Rp.) | TARGET % |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| | Penerimaan Umum | | | | | |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan | 73.110.000 | 6.751.206 | 6.751.206 | 66.358.794 | 9,23 |
| 425912 | Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita Negara | 0 | 37.686.908 | 37.686.908 | 0 | 0 |
| 425129 | Penerimaan Kembali Belanja | 0 | 22.994.980 | 22.994.908 | 0 | 0 |
| 425911 | Pegawai TAYL | 0 | 37.766.098 | 37.766.089 | 0 | 0 |
| | Jumlah Penerimaan Umum | 73.110.000 | 105.199.183 | 105.199.183 | -32.089.183 | 143,89 |
| | Penerimaan Fungsional | | | | | |
| 423216 | Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. Informasi. Pelatihan. Teknologi. Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah Penerimaan Fungsional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Jumlah Umum + Fungsional | | | | | |

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumberdaya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Capaian realisasi anggaran PSEKP pada tahun 2019 sebesar 97,02%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 214/2017), Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSEKP tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana Gambar 5.



Gambar 5. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2019 Berdasarkan Aplikasi Money Kinerja Anggaran PMK 214/2017

Berdasarkan Gambar 5 di atas, capaian kinerja PSEKP pada tahun 2019 adalah sebesar 92,28 atau termasuk kedalam kategori baik. Persentase capaian kinerja anggaran PSEKP tahun 2019 berdasarkan aplikasi money kinerja anggaran PMK 214/2017 di atas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 97,02%.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 75,32%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) akhir adalah 96,04%.

4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 100%.
5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 10,62%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Persentase capaian kinerja PSEKP tahun 2019 dalam hal efisiensi adalah mencapai 20%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah:

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (10,62\%/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,531/100 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,266 \\ &= 0,766 \text{ atau } 76,6\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran PSEKP pada tahun 2019 adalah 76,6% atau cukup efisien.

F. Capaian Kinerja Lainnya

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2019 untuk publikasi Forum Penelitian Agro Ekonomi mendapat penghargaan dari Perpustakaan Nasional yaitu Anugerah Serah Tertib Undang-Undang Deposit atas keaktifan melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Penghargaan diperoleh pada tanggal 23 Juli 2019 yang diterima oleh Dr. Sudi Mardianto selaku Kepala Pusat Sosial Ekonomi Pertanian (Gambar 6).





Gambar 6. Penghargaan yang diterima PSEKP dari Perpustakaan Nasional, 2019

G. Rencana Aksi

Pencapaian kinerja tahun 2019 tidak terlepas dari upaya dan komitmen yang dilakukan berpedoman dari hasil evaluasi kinerja tahun 2018, untuk itu guna memperbaiki kinerja tahun 2019 maka diperlukan upaya perbaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan kinerja tahun 2018. Rekomendasi perbaikan disusun agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada tahun yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti pada Tabel 17 berikut ini.

Tabel 17. Rencana Aksi Perbaikan Kinerja PSEKP tahun 2019

| No. | Indikator Kinerja | Deskripsi Rencana Aksi | % Pagu | Waktu pelaksanaan |
|-----|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan | a. Komunikasi, seminar, publikasi hasil penelitian, dan kerja sama penelitian b. Perencanaan program dan anggaran, perawatan buku perpustakaan, UPSUS c. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian d. Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian | a. 100 b. 40 c. 100 d. 100 | a. Jun & Des b. Jan, Jun & Des c. Des d. Jan s.d Des |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | a. Penerapan manajemen mutu dan layanan publik, pengembangan kapasitas SDM b. Pengadaan peralatan fasilitas kantor seperti mesin penghitung uang, loker 4 pintu, kursi tamu, mesin potong rumput dan buku perpustakaan | a. 14 b. 50 | a. Jun b. Apr s.d Mei |

| No. | Indikator Kinerja | Deskripsi Rencana Aksi | % Pagu | Waktu pelaksanaan |
|-----|---|---|--|--|
| | | c. Pembangunan Gedung B dan perpustakaan | c. 100 | c. Mei s.d Jun |
| 3. | Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | a. Pengelolaan satker dan sistem akuntansi instansi dan perlengkapan b. Kebutuhan sehari-hari perkantoran, internet, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran operasional perkantoran | a. 27 b. 50 | a. Des b. Jan s.d Des |
| 4. | Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | a. Pembinaan dan evaluasi hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut b. Pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 c. Kebutuhan sehari-hari perkantoran, internet, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran operasional perkantoran d. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai e. Pengadaan peralatan fasilitas kantor seperti mesin penghitung uang, loker 4 pintu, kursi tamu, mesin potong rumput dan buku perpustakaan f. Pengadaan alat pengolah data dan software, pengadaan alat studio dan komunikasi | a. 1 b. 100 c. 50 d. 100 e. 50 f. 100 | a. Des b. Feb s.d Maret c. Jan s.d Des d. Jan s.d Des e. Apr s.d Mei f. Mei s.d Jun |
| 5. | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) | Monev dan SPI, seminar hasil penelitian, pengembangan database | 14 | Jun dan Des |

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, PSEKP telah menetapkan tiga sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah: 1) Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan; 2) Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan indikator sasaran kegiatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan tiga indikator sasaran kegiatan yaitu Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang, Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang, dan Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2019, dari lima indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2019 terdapat dua indikator yang berhasil melampaui target, dan tiga indikator berhasil dicapai sesuai target. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya kerja keras semua pihak, baik unsur manajemen, fungsional peneliti, analis kebijakan dan fungsional lainnya, yang secara bersama-sama dengan semangat "*Can Do Spirit*" bekerja sama untuk mewujudkan pencapaian kinerja lembaga. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kedepan perlu terus dijaga dan dikembangkan untuk pencapaian output yang lebih baik lagi.

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping circles in various shades of blue, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin, light blue lines intersect at a point between the circles, forming a triangular shape that frames the central circle. The circles have a layered, 3D effect with different shades of blue.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TA. 2019

Perjanjian Kinerja Pergantian Pimpinan ke Plt



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON. 0251-8333964, 8325177, 8338717, FAKSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Erizal Jamal
Jabatan : Plt. Kepala Pusat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Syukur Iwantoro
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua

Syukur Iwantoro

Pihak Pertama

Erizal Jamal

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|-----------------------|
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan | 90.00 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 3.50 skala likert 1-4 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 0.00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 1.00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) | 1.00 Temuan |

KEGIATAN

Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 34.674.407.000

Jakarta, Februari 2019

Sekretaris Jenderal

Pit. Kepala Pusat

Syukur Iwantoro

Erizal Jamal 

Perjanjian Kinerja Pergantian Pimpinan



KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEFON: 0251-8333864, 8325177, 8338717, FAKSIMILE: 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Momon Rusmono
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2019

Pihak Kedua

Momon Rusmono

Pihak Pertama

Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------------------------|
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan | 90.00 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 3.50 skala likert 1-4 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 0.00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 1.00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenon RB 12 tahun 2015) | 1.00 Temuan |

KEGIATAN

Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

ANGGARAN

Rp. 34.307.407.000

Jakarta, Juli 2019

Sekretaris Jenderal


Womom Rusmono

Kepala Pusat


Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran Hibah Luar Negeri



**KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU
JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR
TELEPON. 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496
Website : <http://pse.litbang.pertanian.go.id> Email : pse@litbang.pertanian.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sudi Mardianto
Jabatan : Kepala Pusat
Selanjutnya disebut pihak pertama

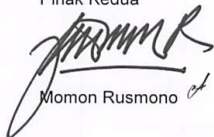
Nama : Momon Rusmono
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2019

Pihak Kedua


Momon Rusmono

Pihak Pertama


Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|------------------------|
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian | Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan | 90.00 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | 3.50 skala linkert 1-4 |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 0.00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang | 1.00 Temuan |
| | | Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) | 1.00 Temuan |

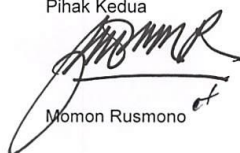
KEGIATAN

Penelitian Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Rp. 35,311,327,000

ANGGARAN

Jakarta, 23 Desember 2019

Pihak Kedua


Momon Rusmono

Pihak Pertama


Sudi Mardianto

The background features a decorative graphic consisting of three overlapping circles in shades of blue, arranged in a diagonal line from the top-left to the bottom-right. The circles are connected by thin, light blue lines that extend across the page. The largest circle is at the top, a medium-sized one in the middle, and a large one at the bottom right, partially cut off by the edge of the page.

LAMPIRAN 2
REKOMENDASI PSEKP TA. 2015-2019

Rekomendasi Kebijakan PSEKP Tahun 2015-2019

Tahun 2015 (33 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengaruh Urbanisasi Terhadap Suksesi Sistem Pengelolaan Usahatani dan Implikasinya terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi pada Lahan Pertanian Bukan Sawah
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian (Lanjutan)
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengembangan Industri Peternakan Mendukung Peningkatan Produksi Daging
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Sistem Komunikasi dalam Pemanfaatan Varietas Unggul Baru Padi Toleran Rendaman dalam Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Valuasi Ekonomi Sumberdaya Genetik Pertanian Indonesia: Studi Kasus Padi
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Akselerasi Pembangunan Pertanian Wilayah Tertinggal Melalui Peningkatan Kapasitas Petani
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Studi Penyusunan Strategi Pemberdayaan Petani Memperkuat Kedaulatan Pangan Sebagai Implementasi UU No. 18 Tahun 2012
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Ketahanan Pangan Nasional Dalam Perspektif Perdagangan Bebas Regional dan Global
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Berbagai Agroekosistem 2007-2016
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penguatan Kelembagaan Penangkar Benih untuk Mendukung Kemandirian Benih Padi dan Kedelai
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Persiapan Pelaksanaan Upaya Khusus mendukung Swasembada Pangan di Jawa Tengah
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis *Producer Support Estimates* (PSE) dan Relevansinya dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Identifikasi Potensi Wilayah Lokasi *Agro Techno Park*, *Agro Science Park*, dan Laboratorium Lapang Inovasi Pertanian
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Harmonisasi Data Produksi dan Konsumsi Beras dalam Kaitan dengan Luas Lahan dan Produktivitas
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Tahun Dasar PDB dan Implikasinya terhadap Analisis Pembangunan Pertanian
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peran Komponen Teknologi dalam Percepatan Swasembada Pangan

19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Mekanisasi Pertanian dari Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan Petani
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Melambungnya Harga Beras dan Solusi Penyelesaiannya
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peluang dan Tantangan Mewujudkan Kedaulatan Pangan Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Sintesis Naskah Analisis Kebijakan
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Telaah Sosial Ekonomi dalam Pengembangan Pangan di Kawasan Timur Indonesia
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Kebijakan Perpupukan Menunjang Ketahanan Pangan Nasional
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Menjadi Lembaga Keuangan Mandiri Perdesaan
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Prospek Pengembangan Pertanian Modern melalui Penggunaan Teknologi Mekanisasi Pertanian pada Lahan Padi Sawah
27. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rekomendasi Kebijakan Penyempurnaan Pelaksanaan Program UPSUS Pajale ke Depan: FGD Evaluasi UPSUS Pajale 2016
28. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Dampak Ekonomi terhadap Usulan Revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
29. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
30. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Komoditas Strategis Sektor Pertanian
31. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Indikator Makro Sektor Pertanian
32. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Mendorong Petani Kecil untuk *Move Up* atau *Move Out* dari Sektor Pertanian
33. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Evaluasi Kinerja Taman Teknologi Pertanian (*Agro Techno Park*) Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Tahun 2016 (26 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Panel Petani Nasional (PATANAS): Analisis Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan pada Agroekosistem Lahan Sawah
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Karakteristik Pertanian dan Ekonomi Perdesaan 2003-2013
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan Faktor Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Sumber-Sumber Pertumbuhan Produksi Jagung dan Kedelai

5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Kinerja dan Potensi Sistem Resi Gudang untuk Sumber Pembiayaan, Stabilisasi Harga dan Peningkatan Pendapatan Petani Jagung dan Kedelai
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Studi Kebijakan Sistem Pengelolaan Irigasi Mendukung Pencapaian dan Keberlanjutan Swasembada Pangan
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Rancangan, Implementasi dan Dampak Bantuan Mekanisasi Terhadap Percepatan Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pola Konsumsi Pangan dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Komoditas Pertanian
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Sistem dan Kebijakan Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Komoditas Pertanian Strategis
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Kinerja Perdagangan antar Pulau dalam Mendukung Pengembangan Komoditas Pertanian
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait Pengkajian Pola Pembibitan Ternak Mendukung Implementasi Legislasi Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi Potong
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Dukungan (*Support*) Pemerintah terhadap Sektor Pertanian: 1995-2025
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Teknologi Gerakan Penerapan-Pengelolaan tanaman Terpadu (GP-PTT) terhadap Peningkatan Produksi dan pendapatan Petani
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Situasi Pasar Komoditas Broiler: Akar Permasalahan dan Prospek Pengembangannya
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Paket Kebijakan X terhadap Industri Hortikultura
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Upaya Peningkatan Produksi Berkelanjutan Komoditas Perkebunan Utama: Gula, Tebu dan Kakao
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsumsi Pangan Hewani dalam Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kota dan Desa di Indonesia
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis pada *Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement*
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Komoditas Pangan Strategis Tahun 2015-2019
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reposisi Kelembagaan dan Tupoksi Kementerian Pertanian dalam Mempercepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Model Pengembangan Agribisnis Padi: Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Pemanfaatan Alsintan
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Review dan Perumusan Indikator Kesejahteraan Petani
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Tataniaga Beras, Bawang Merah, dan Daging Sapi Mendukung Kedaulatan Pangan

25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi dan Penyesuaian Arah Kebijakan Dalam Undang-Undang Pertanian untuk Mempercepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Produksi Wilayah Perbatasan untuk Mendukung Ekspor

Tahun 2017 (25 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Panel Petani Nasional (Patanas): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agro Ekosistem Lahan Kering Berbasis Sayuran dan Palawija
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Daya Tahan Sektor Pertanian terhadap Gangguan Eksternal dan Kebijakan yang Diperlukan Mendukung Ketahanan Pangan Berkemandirian
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Model Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Program Pertanian Modern
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Optimasi Sumberdaya dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Tanaman Pangan
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Subsidi Pupuk: Harga, Distribusi, dan Dampaknya terhadap Permintaan Pupuk dan Produksi Tanaman Pangan
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Insentif Harga Produk Pertanian Strategis Mendukung Ketahanan Pangan Berkemandirian
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Tipologi dan Penguatan Kelembagaan Petani Kecil dalam Rangka Transformasi Menuju Petani Komersial
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemetaan Daya Saing Pertanian Indonesia
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Revitalisasi Kegiatan Hilirisasi Sistem Komoditas Pertanian sebagai Strategi Peningkatan Ekspor
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Efisiensi Rantai Pasok dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volatilitas Harga Cabai, dan Bawang Merah
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Akses Petani terhadap Pasar Komoditas Pertanian
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Efisiensi Rantai Pasok Komoditas Ayam Ras Pedaging dan Petelur Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan Peternak.
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Keberadaan Surplus dan Kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras untuk Menjaga Stabilitas Harga di Tingkat Konsumen
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Konsepsi dan Strategi Implementasi UPSUS SIWAB
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Konsepsi, Implementasi dan Arah Pengembangan Asuransi Pertanian
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Model pengembangan Produksi Pangan di daerah Perbatasan

17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Outlook Indikator Makro Sektor Pertanian 2017-2019: PDB Sektor Pertanian
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Kebijakan Pajak Penambahan Nilai dan HET Gula terhadap Profitabilitas Usahatani Tebu dan Harga Lelang Bagian Petani
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Domestik Support dan Tarif yang layak sebagai unsure proteksi dan promosi ekspor
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pemanfaatan Food Sustainability Indeks (FSI) dan Global Food Security (GFSI) untuk Kebijakan Pembangunan Pertanian Indonesia
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Kebijakan dan Program Menuju Swasembada Kedelai Berkelanjutan
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kinerja Investasi dan Dampak Pengetatan Investasi Asing di Sektor Pertanian
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Review UU Pertanian dan yang dibutuhkan Untuk Mendukung Program Pembangunan Pertanian
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pangan Pokok
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Sintesis Kebijakan Pembangunan Pertanian

Tahun 2018 (25 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kaji Ulang Kebijakan Perbenihan dan Subsidi Benih Padi dan Jagung
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain dan Alternatif Kebijakan Mewujudkan Swasembada Kedelai
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain, Implementasi, dan Respon Stakeholder TTI dalam Pengendalian Harga Pangan Pokok dan Penting
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Manfaat Infrastruktur Air untuk Pertanian Lahan Kering dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pendapatan Petani
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pemanfaatan Sumber Kapital Desa dalam Peningkatan Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Antisipatif Pengelolaan Surplus Produksi Padi dan Jagung
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengoptimalan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Pengembangan Model Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Menuju 2045
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Model Proyeksi Permintaan dan Penawaran Komoditas Pangan Menuju 2045
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak dan Kebijakan Sektor Pertanian dalam Kerjasama MEA

10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Potensi dampak Perubahan Lingkungan Strategi Global terhadap Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Review Kinerja Program Pembangunan Pertanian 2015-2019
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Panel Petani Nasional (PATANAS): Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan di Wilayah Agroekosistem Lahan Kering Berbasis komoditas Perkebunan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rancang Bangun Program Bedah Kemiskinan Sejahtera Berbasis Pertanian
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rendemen dan Rantai Pasok Komoditas Beras
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penetapan Prioritas Substitusi Impor dan Sasaran Pengembangan Komoditas Pertanian 2019-2023
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Tingkat Tarif Beberapa Komoditas Pertanian Strategis
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reviu Kebijakan Harga Pangan (Murah) dan Dampaknya terhadap Produksi dan Ketersediaan Pangan
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan HPP dan Harga Eceran Tertinggi Gabah dan Beras
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reviu Regulasi yang Menghambat Investasi dan Ekspor Pertanian
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Model Asuransi Usahatani Kedelai
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Wajib Tanam Lima Persen Bagi Impor Bawang Putih
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Optimalisasi Pemanfaatan Bantuan Alat Mesin Pertanian dan Dampaknya terhadap Peningkatan Produksi
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Reviu Fluktuasi Harga Telur dan Daging Ayam di Tengah Surplus Produksi
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peluang-peluang Positif dalam Rangka Kerjasama RCEP
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Efektivitas Kelembagaan Fungsional Peneliti Penyuluh dalam Mendukung Program Akselerasi Inovasi Pertanian.

Tahun 2019 (26 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Kesejahteraan Rumah Tangga Petani
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Ekspor dalam Mendorong Pertumbuhan Subsektor Hortikultura dan Pendapatan Petani
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Manajemen Rantai Pasok Komoditas Buah Substitusi Impor di Kawasan Sentra Produksi
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Keberlanjutan Pengembangan (Kawasan) TSP-TTP dan Pertanian Bio Industri

5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Pertanian dan Perdesaan
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pengembangan Perbenihan Sayuran Nasional
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Rancang Bangun dan Implementasi Konsolidasi Usahatani Beberapa Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian Unggulan
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Permasalahan, Tantangan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2020-2024
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Asuransi Pertanian dan Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Tani Tebu dan Kakao
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Ekonomi Perdesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedele (UPSUS PAJALE)
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA)
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Optimalisasi Alat dan Mesin Pertanian (OPSIN)
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI)
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Evaluasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Desain Pengembangan Penyangga Pangan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur
20. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pengenaan PPN Produk Pertanian
21. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsep dan Perhitungan Nilai Tukar Sebagai Alternatif Perbaikan Nilai Tukar Barter-BPS
22. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Studi Rancang Bangun Kelembagaan Petani Mendukung Program "Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI)"
23. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Pelaksanaan BPNT dan Implikasinya terhadap Manajemen Cadangan Beras Pemerintah
24. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Perang Dagang China vs Amerika Serikat terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia
25. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Rancangan Implementasi Asuransi Usaha Ternak Kambing/Domba
26. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Identifikasi Potensi Ekspor Komoditas Pertanian